

REFERENSI

VISI MISI DAN PROGRAM KERJASAMA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DONOR LINGKUP BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN



DEPARTEMEN KEHUTANAN
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
TAHUN 2007

**Sub Bagian Kerjasama
Bagian Program dan Anggaran
Sekretariat Badan Planologi Kehutanan
Desember 2007**

Editor :

**Ir. Augustijana Kartasasmita, M. Sc.
Nurlela Komalasari, S. Hut.**

Cover : Koleksi Foto Presentasi

PENGANTAR

Puji syukur kepada Alloh SWT atas tersusunnya buku referensi visi, misi dan program kerjasama lembaga-lembaga negara donor lingkup Badan Planologi Kehutanan tahun 2007.

Setelah buku yang pertama disusun dengan menyajikan visi, misi dan program negara-negara donor pada tahun 2006, maka buku kedua ini disusun untuk melengkapi informasi yang telah disajikan pada buku pertama.

Buku ini antara lain memuat informasi mengenai latar belakang, visi, misi, tujuan, program dan kegiatan, serta mekanisme kerjasama dari lembaga negara-negara donor seperti JICA, ITTO, GTZ, dan USAID. Isi buku ini adalah berbagai hal yang menyangkut lembaga donor maupun tata cara pengajuan proposal. Isi buku ini adalah kondisi sampai dengan bulan Oktober 2007, saat buku ini disusun.

Dengan adanya informasi ini diharapkan para pihak yang berada di lingkup Badan Planologi Kehutanan baik di pusat maupun daerah serta instansi lain yang hendak mengajukan proposal untuk kerjasama luar negeri dapat terbantu dengan buku ini.

Penyusunan buku referensi yang diinisiasi oleh Sub Bagian Kerjasama Teknik Bagian Program dan Anggaran dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Planologi Kehutanan dan lembaga-lembaga donor serta mitranya. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih.

Untuk kesempurnaan isi buku referensi ini, saran maupun masukan dapat disampaikan kepada Sekretariat Badan Planologi Kehutanan.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2007

SEKRETARIS
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN,

Ir. M. ALI ARSYAD, M. Sc.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
ABBREVIATION	v
FOTO KEGIATAN KERJASAMA	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Dasar Pelaksanaan	2
D. Ruang Lingkup	2
II. KEBIJAKAN KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG KEHUTANAN.....	1
A. Pendahuluan	3
B. Arah Kebijakan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan.....	3
C. Prioritas Hibah Luar Negeri Sektor Kehutanan	4
D. Kriteria Proyek yang Diusulkan	5
E. Perencanaan PHLN (PP 2/2006)	5
F. Beberapa Ketentuan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PP 2/2006)	6
G. Issue Kerjasama Luar Negeri Lingkup Departemen Kehutanan Mendatang.....	6
III. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI BAPLAN TAHUN 2006	7
A. PROYEK KERJASAMA : INDONESIA – JERMAN (GTZ).....	7
B. PROYEK KERJASAMA: INDONESIA – WORLD BANK (FOMAS).....	11
C. PROYEK KERJASAMA: INDONESIA – INGGRIS (MFP)	14
IV. VISI, MISI DAN PROGRAM NEGARA-NEGARA DONOR YANG TERKAIT KEPLANOLOGIAN	20
A. <i>Japan International Cooperation Agency (JICA)</i>	20
B. <i>International Tropical Timber Organization (ITTO)</i>	36
C. <i>Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)</i>	42
D. USAID	44

V. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI BAPLAN TAHUN 2007 DAN TAHUN MENDATANG	47
<i>A. Support on Forest Resource Management Through Leveraging Satellite Image Information</i>	<i>47</i>
<i>B. Advisory for Facillitating Implementation of National Strategy on Forestry</i>	<i>54</i>
<i>C. Technical Coopration Forestry Programme in Supporting Implementation of The Ministry Forestry's Strategic Plan (Project Digest)</i>	<i>55</i>
VI. WEBSITE-WEBSITE YANG TERKAIT DENGAN KERJASAMA BANTUAN LUAR NEGERI	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Skema dan Sumber Pendanaan Luar Negeri	4
2.	Kegiatan FOMAS Tahap I	13
3.	Komponen Prioritas Program MFP	15
4.	Beberapa Contoh Kegiatan yang Didanai Oleh MFP.....	19
5.	Contoh Format Usulan ke JICA (PBIS)	26
6.	Application Form for Japan's Technical Cooperation	27
7.	Formulir Aplikasi Technical Cooperation Project	28
8.	Formulir Aplikasi Untuk Rencana Pengembangan Studi	30
9.	Formulir Aplikasi Japan's Grant Aid General Fisheries	33
10.	Daftar Kegiatan Kerjasama JICA di Indonesia	34
11.	Phase dalam Mekanisme kerjasama	39
12.	Contoh Kegiatan yang Sudah Berjalan dan yang akan dilaksanakan di berbagai daerah	44
13.	Project Digest Forest Resource Management Using Satellite Image Tahun 2007	46
14.	Advisory for Facilitating Implementation of National Strategy on Forestry	48

ABBREVIATIONS

SFM	: Sustainable Forest Management
CDM	: Clean Development Mechanism
ITTO	: International Tropical Timber Organization
PBIS	: Project Brief Information Sheet
FMU	: Forest Management Unit
JICA	: Japan International Cooperation Agency
GTZ	: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
FOMAS	: Forest Monitoring and Assessment System
DFID	: Department for International Development
MFP	: Multistakeholders Forestry Programme
PHLN	: Pinjaman Hibah Luar Negeri
SMCP	: Strengthening the Management Capacities
NFP	: National Forest Programme
PKN	: Program Kehutanan Nasional
NFS	: National Forest Statement
CGIF	: Consultative Group on Indonesian Forestry
FRS	: Forest Reporting System
PDTK	: Peta Dasar Tematik Kehutanan
FDG	: Forest Discussion Group
TCP	: Technical Cooperation Programme
CEP	: Community Empowerment Programme
DS	: Development Studies
LTE	: Long - Term Expert

FOTO KEGIATAN KERJASAMA



- Pelatihan Penyusunan Proposal BLN dalam Bahasa Inggris, November 2007
- Kerjasama Badan Planologi Kehutanan, Pusdiklat Kehutanan dan GTZ



- Foto Pelatihan Pengukuran Terestris dengan Menggunakan Total Station, April – Mei 2007
- Kerjasama Badan Planologi Kehutanan, Pusdiklat Kehutanan dan Departemen Geodesi ITB

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kehutanan khususnya lingkup bidang planologi kehutanan maka perlu dibangun kerjasama dengan multi pihak dengan asumsi bahwa kegiatan-kegiatan strategis yang tidak atau belum dapat terakomodasikan pendanaannya melalui dukungan dan pemerintah dapat diupayakan melalui penjalinan kerjasama. Kerjasama tersebut tidak dibatasi hanya dengan pihak-pihak dalam negeri, akan tetapi terlebih penting adalah kerjasama internasional dengan pihak asing antara Pemerintah dengan Pemerintah (Government to Government - G to G) dan atau lembaga swadaya masyarakat (Non Government - NGO) dalam bentuk kerjasama bilateral atau multilateral.

Salah satu kegiatan yang penting dan utama dalam penjalinan kerjasama adalah informasi mengenai visi, misi dan program kerjasama lembaga-lembaga negara donor. Badan Planologi Kehutanan dalam kaitan ini berinisiasi untuk menyusun buku visi, misi dan program kerjasama lembaga-lembaga negara donor lingkup Badan Planologi Kehutanan dengan harapan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder dalam menyusun suatu project proposal yang sesuai dengan lembaga-lembaga negara donor yang dituju.

B. Tujuan

1. Memberikan informasi mengenai visi, misi dan program kerjasama lembaga-lembaga negara donor kepada instansi di daerah (BPKH atau Dinas Kehutanan) sehingga SDM di daerah dapat menyesuaikan substansi project proposal dengan kebijakan dan keinginan pihak donor yang dituju.
2. Memberikan informasi mengenai kegiatan kerjasama teknik bidang planologi kehutanan yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP 2. Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu
4. Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: SK. 82/VII-SET/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 Tentang Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan)
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Planologi Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor: 033.0/29-06.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

D. Ruang Lingkup

Buku referensi ini memuat beberapa profil lembaga-lembaga negara donor yang terkait dengan bidang planologi kehutanan dan memuat kerjasama yang akan dan sedang berlangsung antara Baplan dan Lembaga-lembaga negara donor di tahun 2006 dan 2007. Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Bidang Kehutanan dan Issue Kerjasama Luar Negeri juga termuat dalam buku ini dan disertakan juga daftar instansi dan e-mail lembaga dalam dan luar negeri.

Buku referensi ini merupakan edisi revisi dari buku referensi Sosialisasi Visi, Misi dan Program Negara-negara Donor Badan Planologi Kehutanan tahun 2006. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dan kunjungan ke beberapa Dinas Kehutanan Propinsi dan Unit Pelaksana Teknis Baplan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan – BPKH) dan melalui pengumpulan data-data sekunder yang tersedia di Lingkungan Departemen Kehutanan.

II. KEBIJAKAN KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG KEHUTANAN

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah memanfaatkan pinjaman luar negeri mulai pertengahan tahun 1960an. Terjadinya krisis ekonomi tahun 1997/1998 secara signifikan membuat angka *Debt to GDP ratio* meningkat sangat tajam (karena depresiasi rupiah lebih dari 500 persen). Sejak krisis ekonomi tersebut, ada kesepakatan untuk membatasi pinjaman LN baru sehingga secara bertahap stock hutang dalam APBN bisa terus dikurangi.

Departemen Kehutanan sekitar tahun 1997 menghentikan program kerjasama dengan negara donor dalam hal kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana pinjaman.

B. ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN

1. RPJM 2004 - 2009

Pencapaian sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), dengan tetap menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro

2. RENCANA STRATEGIS BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2005 – 2009 (Penyempurnaan)

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kebijakan di bidang planologi kehutanan sebagai penjabaran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2005 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Rentra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, dan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Kehutanan dan peraturan terkait lainnya yang akan memberikan arah dan kebijakan pembangunan Bidang Planologi Kehutanan periode tersebut.

C. PRORITAS HIBAH LUAR NEGERI SEKTOR KEHUTANAN

Prioritas kegiatan yang disulkan dalam periode ini hendaknya mendukung atau sejalan dengan “Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan tahun 2005 – 2009”, sebagai berikut :

1. Penanggulangan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal.
2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya revitalisasi industri kehutanan.
3. rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
4. pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan.
5. Pemantapan kawasan hutan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, beberapa kegiatan yang dapat diusulkan adalah antara lain :

1. Perbaikan kualitas LH antara lain konservasi, rehabilitasi dan penegakan hukum
2. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari
3. Revitalisasi sektor kehutanan untuk mendukung peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja berbasis SFM
4. Perubahan iklim - *climate change*

Tabel 1. Skema dan Sumber Pendanaan Luar Negeri

Skema	Sumber
1. Hibah • Dana Tunai • Barang • Jasa/Tenaga Ahli 2. Pinjaman • Pinjaman lunak dan campuran • Fasilitas Kredit Ekspor • Komersial	1. Bilateral • Hibah, pinjaman lunak dan campuran 2. Lembaga / organisasi multilateral / internasional • Hibah dan pinjaman 3. Perbankan / lembaga keuangan internasional • Obligasi Internasional • Kredit Ekspor, komersial

D. KRITERIA PROYEK YANG DIUSULKAN

Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dalam menyusun usulan BLN untuk daerah (Provinsi dan Kabupaten) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan inisiatif dan kewenangan daerah
2. Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat Daerah setempat
3. Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di Daerah yang bersangkutan, serta sejalan dengan RPJMN
4. Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman
5. Telah mendapat persetujuan dari BAPPEDA atau DPRD bersangkutan

E. PERENCANAAN PHLN (PP 2/2006)

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah - RPJM**
2. **Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri - RKPLN :**
Meliputi rencana kebutuhan dan pemanfaatan PLN tahunan, disusun oleh Menkeu dan MenPPN dan ditetapkan Presiden
3. **Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri Jangka Menengah - DRPHLN JM :**
Rencana K/L, Pemda, BUMN yang layak dibiayai PHLN, ditetapkan MenPPN
4. **Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri - DRPHLN**
DRPHLN JM yang telah memiliki indikasi sumber pendanaan PHLN
5. **Daftar Kegiatan**
DRPHLN yang telah memiliki komitmen pendanaan dari calon donor, dan siap negosiasi dan penandatanganan
6. **Naskah perjanjian PHLN**
Ditandatangani oleh MenKeu
7. **RPK-PHLN**
Rencana pelaksanaan kegiatan

F. BEBERAPA KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PP 2/2006)

1. Jumlah dari pinjaman/hibah luar negeri yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dituangkan dalam dokumen satuan anggaran (catatan: semua hibah harus tercatat dalam dokumen anggaran)
2. Penarikan pinjaman/hibah luar negeri harus tercatat dalam realisasi APBN.

G. ISSUE KERJASAMA LUAR NEGERI LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN MENDATANG

Issue yang sedang banyak dibicarakan di seluruh dunia saat ini adalah mengenai pemanasan global atau yang dikenal dengan *Global Warming/Climate Change*. Terkait dengan isu tersebut banyak negara-negara maju yang mendukung untuk mengurangi pemanasan global yang membahayakan. Salah satu dukungan negara-negara maju tersebut adalah mengadakan kerjasama dengan Indonesia termasuk Departemen Kehutanan dimana saat ini sedang disusun MoU diantara kedua negara.

Beberapa negara donor yang bekerjasama dengan Departemen Kehutanan terutama terkait dengan isu *Global Warming/Climate Change* untuk jangka waktu 5 tahun yaitu:

1. Jerman dengan dana $\pm$ 26 juta Euro
2. Inggris dengan dana $\pm$ 5 juta Euro
3. Australia dengan dana $\pm$ 80 juta US \$

III. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI BAPLAN TAHUN 2006

A. PROYEK KERJASAMA : INDONESIA – JERMAN (GTZ)

Nama Proyek	: Strengthening the Management Capacities in the Ministry of Forestry (SMCP-GTZ) Republik Federal Jerman
Instansi Pelaksana	: Badan Planologi Kehutanan
Masa Kerjasama	: 1 April 2001 s/d 31 Maret 2003 (Phase II) 1 April 2003 s/d Maret 2005 (Phase III) perpanjangan s/d Desember 2005 Fase IV (2006 – 2008)
No Naskah Perjanjian	
Luar Negeri	: Wz 445.02/16 Note No. 606/2002 tgl 31 Juli 2001
Jumlah Dana	: DM. 3 million (Rep. Fed. Germany) Phase II Euro 600,000 Phase II up to Euro 500,000 (additional fund) Phase IV Euro 2,000,000
GOI Contribution	: in kind <i>Counter Budget</i> untuk anggaran proyek SMCP tahun 2006 dan tahun 2007 di-alokasikan pada anggaran Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Baplan
Jenis Bantuan	: Grant / Hibah

Tujuan :

1. Mewujudkan reformasi kebijakan kehutanan untuk meningkatkan kerangka kondisi penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari di tingkat propinsi dan kabupaten.
2. Pengembangan *National Forest Programme* (NFP) melalui proses konsultasi dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait secara bersama-sama dan untuk memulai pelaksanaannya.

Indikator :

1. Program Kehutanan Nasional (pkn) berlanjut berdasarkan prinsip-prinsip utama pkn, (pernyataan kehutanan nasional, analisa sektor, rencana aksi)
2. Program Kehutanan Nasional didukung oleh komponen program peningkatan kapasitas untuk mendukung terwujudnya struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi
3. Prosedur pelibatan masyarakat dalam reformasi kehutanan terlaksana di tingkat nasional, propinsi maupun lokal sehingga paling tidak 50% dari proses pengambilan keputusan dalam pengambilan kebijakan kehutanan disemua tingkatan telah memenuhi acuan internasional yang ditetapkan dalam Consultative Group on Indonesian Forestry (CGIF)
4. Peraturan dan Perundangan nasional yang relevan dilaksanakan dalam kondisi yang harmonis oleh provinsi dan kabupaten yang ditetapkan sebagai implementasi program, sehingga dapat dicapai paling sedikit 10% pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari

Kegiatan Pokok sesuai dengan AWP

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, SMCP melalui tim tenaga ahli dan kerjasama dengan pihak terkait akan menyediakan dukungan kegiatan sebagai berikut :

1. Mendukung proses nfp Indonesia melalui pengembangan konsep komunikasi dan mekanismenya
2. Mendukung peningkatan kapasitas kepada para pihak terkait dalam penguatan proses nfp diantaranya dalam bidang:
 - Perencanaan kehutanan lintas sektoral
 - Mekanisme partisipasi dalam pengelolaan hutan
 - Monitoring dampak dalam pengelolaan proyek kerjasama
 - Penanganan konflik
3. Penyusunan modul pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan nfp
4. Mendukung mekanisme pengembangan keuangan alternatif untuk mendukung program pembangunan kehutanan non bank.
5. Mendukung dan memfasilitasi dialog multipihak dan proses konsultasi publik untuk menghasilkan keputusan yang transparan dan akuntabel pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten (sasaran pada tingkat daerah adalah provinsi Kalimantan timur).

6. Mendukung harmonisasi peraturan dan kebijakan kehutanan di berbagai tingkat baik di tingkat nasional maupun kabupaten
7. Mendukung kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi pada daerah sasaran yaitu wilayah Kalimantan Timur

Keluaran :

1. Meningkatnya kemampuan dan kapabilitas SDM dan Departemen Kehutanan serta stakeholders terkait lain dalam proses reformasi sektor kehutanan
2. Menguatnya komitmen internasional kehutanan dan pelaksanaannya melalui *advisory services* dan program pelatihan
3. Departemen Kehutanan mampu untuk memanfaatkan dukungan SMCP dalam hal moderasi kerjasama, dialog, konsultasi dan negosiasi di antara stakeholders
4. Departemen Kehutanan untuk melibatkan lembaga dan organisasi terkait lain pada tingkat nasional dan regional untuk melaksanakan strategi dan kebijakan sektor kehutanan

Kendala dan Permasalahan :

1. Sosialisasi NFP ke dalam dan keluar Departemen Kehutanan Belum optimal
2. Belum berjalannya 'roda sekretariat NFP' dengan mantap
3. Jejaring kerja atau networking belum terbentuk dengan mantap
4. Koordinasi antar sektor/departemen masih lemah
5. *National Forest Statement* sudah tersusun tetapi belum dilaksanakan.

Saran Pemecahan :

1. Melaksanakan sosialisasi NFP di dalam dan di luar lingkup Dephut (termasuk ke daerah)
2. Mengembangkan pelaksanaan AWP (Pokja NFP, SMCP, Baplan, Eselon I Terkait)
3. Mengelola interim sekretariat NFP secara profesional untuk mendukung proses NFP
4. Mengembangkan *networking* atau jejaring kerja untuk menunjang proses NFP
5. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme kerja antar sektor dan mendukung jalannya konsultasi melalui forum IDCF
6. Mempercepat tersusunnya *National Forest Statement* melalui dialog *multistakeholder*
7. Meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek SMCP oleh *stakeholder* terkait

8. Menyediakan dana pendamping APBN untuk mempermantap kegiatan monitoring dan evaluasi serta integrasi program sejalan dengan 5 kebijakan prioritas Dephut.

Contact Person :

1. **Mr. Georg Buchholz**, Team Leader SMCP-GTZ (Fase IV s/d 2008), Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 6, Senayan, Jakarta. Telp. 5730692 Email: Georg.Buchholz@gtz.de
2. **Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc.** Kepala Pusat Rencana Kehutanan (*Executing Agency*), Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lt.5, Senayan, Jakarta. Telp. 5730270
3. **Dra. Yani Septiani, M. Sc.**, Seconded SMCP-GTZ, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 6, Senayan, Jakarta. Telp. 5730692, Email: smcpys@cbn.net.id

Alamat Proyek :

SMCP-GTZ

Gd. Manggala wanabakti Blok VII Lt. 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270
Email:gtzsmcp@cbn.net. Telp.62.21-5720214, Fax.62-21-5720193

GTZ Office Jakarta

Deutsche Bank Build 20th Fl.
Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310
Tel : 021-3192 4007
Fax : 021 3192 4070
Website : www.gtz.de/indonesia

B. PROYEK KERJASAMA: INDONESIA – WORLD BANK (FOMAS)

Nama Proyek : Fomas (Forest Monitoring and Assessment System)

Implementing Agency : Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan

Latar Belakang :

Pengambilan keputusan dalam kebijakan pengelolaan hutan Indonesia di setiap level pengelolaan sering menghadapi berbagai permasalahan data sebagai berikut :

1. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas data » tidak tersedianya protocol data Sumber Daya Hutan (SDH) nasional
2. Kurangnya standard nasional, kualitas dan cakupan data SDH » kebijakan desentralisasi
3. Pengelolaan hutan dan keputusan kebijakan tidak terinformasikan secara baik » rendahnya koordinasi dan sistem pelaporan hutan/*Forest Reporting System* (FRS)
4. Kurang/tidak tersedianya data dan informasi SDH yang sesuai dengan kebutuhannya
5. Kurangnya informasi mengenai dimana tersedia data SDH yang dibutuhkan
6. Kurang konsisten atau rendahnya kualitas data SDH (misalnya akurasi rendah, ketidaksesuaian, tidak tepat waktu (*real time*) dan tidak terintegrasi)
7. Belum tersedianya peta dasar kehutanan yang akurat, sehingga tidak tersedia satu acuan yang sama

Peran Fomas :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kehutanan baik spasial maupun non spasial secara nasional
2. Fokus pada upaya dan efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan
3. Mendukung perencanaan kehutanan dan harmonisasi alokasi penataan ruang
4. Mendukung pengelolaan hutan lestari dan rehabilitasi hutan
5. Memenuhi kewajiban beberapa konvensi internasional

Cakupan kegiatan FOMAS :

1. Membangun kebijakan terbuka (*transparent and disclosure policy*) dalam penggunaan data / informasi SDH
2. Menyusun prosedur tentang tata cara pengelolaan, analisa, dan penggunaan data informasi SDH untuk pemantauan dan penilaian SDH

3. Mengumpulkan data dan informasi SDH yang diperlukan dan melakukan analisa secara tepat untuk pengambilan keputusan
4. Penyusunan tata aturan penyimpanan data (*archiving*) secara sistematis dan terintegrasi
5. Pembangunan sistem registrasi hutan nasional

Rencana Kegiatan :

1. Pembangunan FOMAS dilakukan secara bertahap (khususnya 3 tahap utama)
2. Tahap I (selama 6 bulan – pada tahun 2005 – 2006)
3. Tahap II pengembangan (selama 4 – 5 tahun)
4. Tahap III implementasi (selama 5 – 10 tahun)

Kegiatan Tahap I :

1. Pengumpulan data yang telah ada
2. *Capacity Building*
 - Pelatihan singkat dalam negeri (pelatihan manajerial dan pelatihan teknis) dan luar negeri
3. Dialog
 - Pembentukan FDG/Forest Discussion Group on FOMAS
 - Rapat koordinasi 2 mingguan
 - Lokakarya transparansi dan lokakarya FLEG (Bali dan Jakarta)
 - Lokakarya kabupaten (rencana: Kutai Timur, Kapuas Hulu, Musi Rawas dan Wonosobo – dapat berubah sesuai masukan)
4. Infrastruktur (peralatan)
5. Penyusunan proposal kegiatan tahap II secara rinci berdasarkan masukan selama kegiatan tahap I ini

Kegiatan Tahap II :

1. Pengembangan dan pengujian sistem
2. Pembangunan rancangan basis data multi level yang terintegrasi
3. Pembangunan protocol data SDH

Kegiatan Tahap III :

1. Implementasi dan pengujian kegiatan
2. Evaluasi dan penyempurnaan

Progress Kegiatan Fomas sampai dengan tahun 2006 :

1. Identifikasi ketersediaan data spasial kehutanan lingkup Dephut
2. Dialog/Pertemuan
 - a. Pembentukan FDG (Forest Discussion Group) on FOMAS , terdiri dari wakil eselon II lingkup DEPHUT
 - b. Rapat koordinasi sebanyak 5 kali pertemuan dengan hasil:
 - Daftar Ketersediaan dan kebutuhan data spasial kehutanan lingkup Dephut (sebagai bahan kustodian data kehutanan)
 - Konsep mekanisme arus data antar eselon I lingkup Dephut
 - Identifikasi sarpras dan SDM pengelolaan data spasial kehutanan lingkup Dephut

Tabel 2. Kegiatan FOMAS Tahap I

KEGIATAN	TARGET/OUTPUT	WAKTU	KETERANGAN
IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN DATA KEHUTANAN LINGKUP DEPHUT	DAFTAR KETERSEDIAAN DATA MASING-MASING ESELON II LINGKUP DEPHUT	Desember 2005 - Januari 2006	
PERTEMUAN FDG (Rapat koordinasi FDG)	PEMBENTUKAN FDG, SOSIALISASI FOMAS DAN RENCANA KERJA, KONSEP KUSTODIAN DATA KEHUTANAN DAN MEKANISME ARUS DATA LINGKUP DEPHUT	Desember 2005 - Agustus 2006	Anggota FDG terdiri dari wakil eselon II
LOKAKARYA TRANSPARANSI	Kebijakan Transparansi	Januari 2006	Sudah dilaksanakan oleh PHKA/FLEG
UJI COBA PENGUMPULAN DATA KEHUTANAN LINGKUP PROVINSI	Terkumpulnya Data spasial/non spasial kehutanan lingkup provinsi Kalimantan Barat	Mei 2006	Usulan provinsi masih sementara
CAPACITY BUILDING	- PELATIHAN PENGEMBANGAN SISTEM BASIS DATA SPASIAL DI DALAM NEGERI (DEPHUT) - KUNJUNGAN/TUKAR PENGALAMAN PENGELOLAAN SISTEM BASIS DATA DI LUAR NEGERI (India, Italia, Washington)	Mei - Juni 2006 Juni -Juli 2006	Target Pelatihan untuk level manager dan operator tiap eselon I lingkup Dephut
PENYUSUNAN PROPOSAL FOMAS TAHAP II	PROPOSAL FOMAS UNTUK TAHAP II, MELIPUTI RENCANA: - Pengembangan dan Pengujian system - Pembangunan rancangan basis data multilevel yang terintegrasi - Pembangunan protocol data SDH	Agustus 2006	

C. PROYEK KERJASAMA : INDONESIA – INGGRIS (MFP)

Nama Proyek : Multistakeholders Forestry Programme (MFP)
Department for International Development (DFID)
Pemerintah Kerajaan Inggris

Instansi Pelaksana : Badan Planologi Kehutanan dan Eselon I terkait

Masa Kerjasama : 2000 s/d 2006 (5 tahun)
Periode 2004 – 2006

No. Naskah perjanjian

Luar Negeri : Programme Memorandum Tahun 2000

Jumlah Dana : 24 juta poundsterling, dengan perincian :

- Human Resorces : 5 juta poundsterling
- Office & Running Cost : 2 juta poundsterling
- Facilitating : 3 juta poundsterling
- Partnership Mechanism : 14 juta poundsterling

GOI Contribution : in Kind

Jenis Bantuan : Grant / hibah

Tujuan Proyek :

1. Menarik pelajaran atas kejadian-kejadian penting dan memberi rekomendasi dalam berbagai aspek kebijakan, khususnya berkaitan dengan tema pertemuan, dan dampaknya terhadap isu kehutanan dan masyarakat miskin
2. Merefleksikan pengalaman dan capaian Program Kehutanan Multipihak, baik dari sudut platform, output program, maupun cara pelaksanaannya (proses dialog multipihak dan isu-isu manajerial)
3. Mengukuhkan *common flatform programme* dan proses-proses yang disepakati untuk pelaksanaannya
4. Merancang strategi tahunan Program Kehutanan Multipihak dan mengambil keputusan atas beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen program

Keluaran (Output dalam Program Memorandum) :

1. Kebijakan Kehutanan yang berkontribusi pada strategi kehutanan nasional (*Decentralized multistakeholder policy action*)
2. Terdapat Contoh Mekanisme untuk mengawasi dan mengajak penggunaan dan investor hutan bertanggung jawab atas kinerja mereka (*Accountability Mechanisme & Performance Inspection/Monitoring*)

3. Dikembangkannya sikap, kesadaran dan keterampilan untuk pengambilan keputusan melalui dialog dan advokasi (*Attitude Change, Awareness Raising & Skills Development*)
4. Pengguna hutan dan penyedia jasa kehutanan menunjukkan kapasitas untuk penerapan pengelolaan hutan bagi penghidupan masyarakat miskin (*Capacity Building on the Ground of Environmental Livelihoods Forest Initiatives*)
5. Dokumentasi dan komunikasi yang mantap, meningkatkan pengetahuan dan percepatan pembelajaran bersama tentang kebijakan dan praktek pengelolaan hutan yang terbaik (*Share learning, improved documentation & communication*)

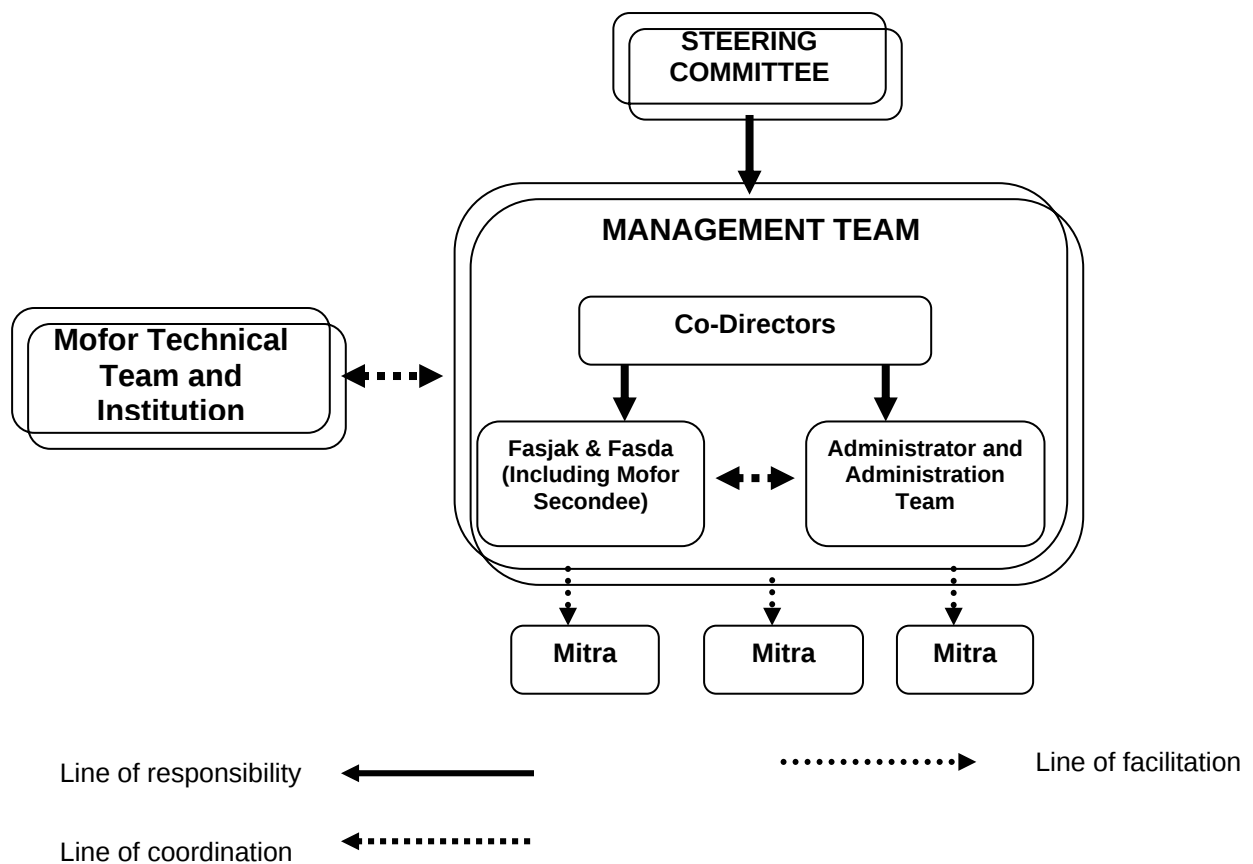
Komponen Prioritas Program (Kerangka Kerja 2004-2006)

Komponen prioritas program MFP merupakan integrasi output DFID dan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan berdasarkan kerangka kerja yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2004 di Jakarta.

Tabel 3. Komponen Prioritas Program MFP

Komponen Prioritas	Keterkaitan dengan Kebijakan Departemen Kehutanan
Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	Social Forestry, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, penguatan desentralisasi sektor kehutanan, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia
Restrukturisasi Sektor Kehutanan	Social Forestry, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, pemberantasan penebangan liar, penguatan desentralisasi sektor kehutanan, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia
Penguatan Kapasitas Nasional dalam Proses Internasional	Social Forestry, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, Restrukturisasi sektor kehutanan pemberantasan penebangan liar, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan

Bagan 1. Struktur Organisasi MFP 2004-2006 :



Struktur Kemitraan :

1. Terdapat 200 mitra yang terdiri dari civil society dan pemerintah dengan komposisi
 - NGOs (70%)
 - Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten (14%)
 - Academisi, Masyarakat, Swasta & Perorangan (16%)
2. Penyebaran dukungan terhadap NGOs:
 - NGO Daerah (48%)
 - NGO Nasional (17%)
 - NGO Internasional (5%)
3. Aspek kegiatan yang didukung :
 - Kemiskinan dan keadilan dalam pemanfaatan SDA
 - Pengembangan kapasitas dan partisipasi dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan
 - NGO Internasional (5%)

4. Sebaran sesuai aspek :

- Pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan pengembangan kapasitas (50%)
- Mendorong Komunikasi, pertukaran informasi, dan pembelajaran bersama (18%)
- Advokasi dan media (13%)
- Penelitian tentang konflik, proses multipihak, pemantapan kawasan dan pembalakan liar (11%)

Mekanisme Hibah Departemen Kehutanan :

1. Hibah Dephut (Mofor Block Grant)
2. MoU RI-UK tentang Illegal Logging
3. Pusren Management Program

Hibah Departemen Kehutanan :

1. Keputusan Kepala Baplan Kehutanan (SK No 72/2004) tentang Mekanisme Pemberian Hibah Program Kehutanan Multipihak untuk Proposal dari Instansi Lingkup Dephut dan Peningkatan Kapasitas Staf melalui Keikutsertaan dalam Pelatihan/Pertemuan
2. Peningkatan Kapasitas berkaitan dengan prioritas program MFP:
 - CBFM (peningkatan peran, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat hutan)
 - Revitalisasi sektor kehutanan khususnya Industri Kehutanan (peran multipihak, forest governance, sertifikasi, kajian supply demand SDH)
 - Penguatan kapasitas dalam proses internasional (proses nfp, mekanisme pendanaan sektor kehutanan, kesepakatan internasional bidang kehutanan)

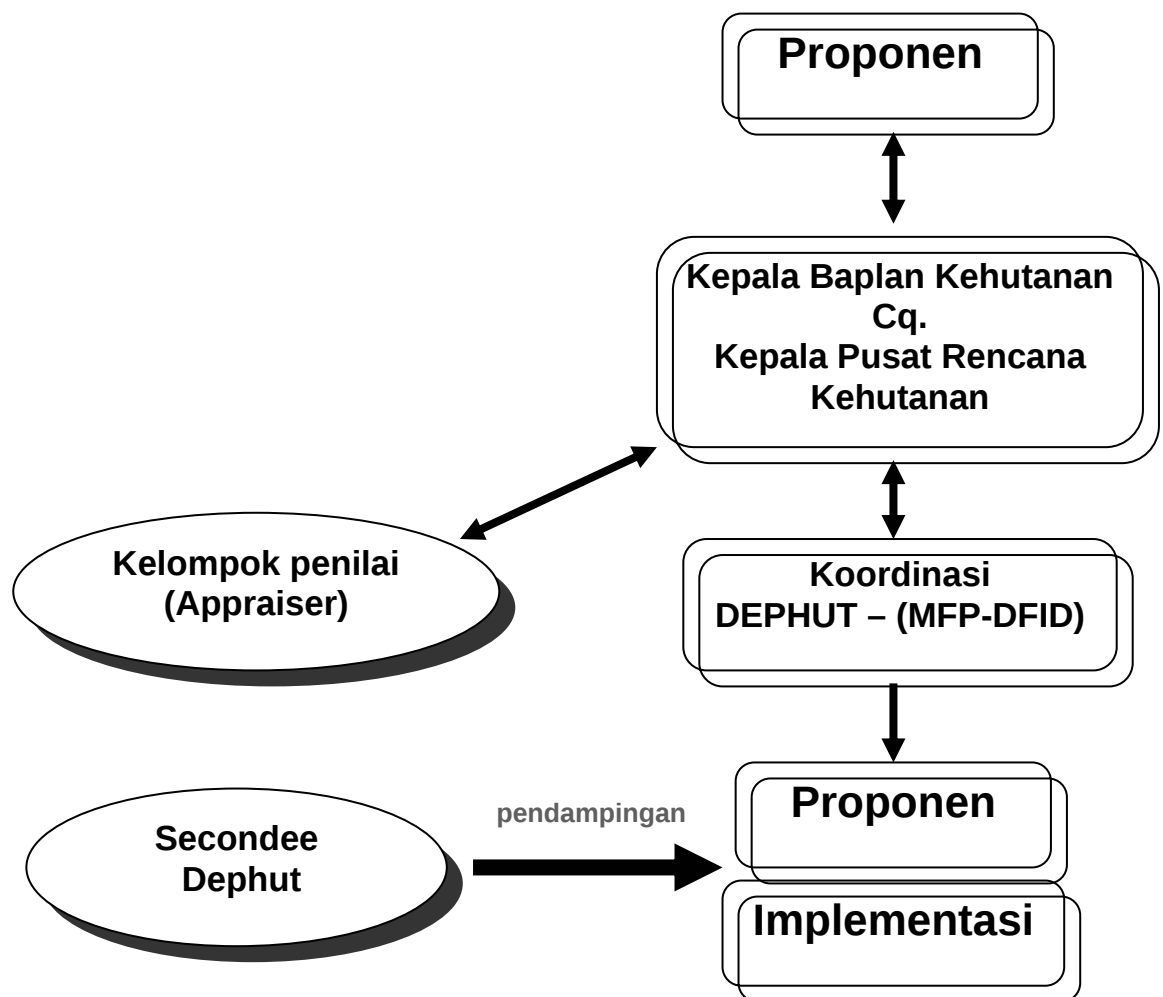
Kriteria Penilaian Proposal :

1. Penyampaian meliputi: Format, Bahasa, Kerangka Logis, dan Inisiatif (orisinalitas, kelanjutan, replikasi)
2. Isi meliputi: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Kegiatan, Analisa Permasalahan dan Hasil, Rencana Kerja dan Tata Waktu, dan Anggaran
3. Relevansi dengan 3 prioritas program (memberdayakan, mendukung, berkaitan atau tidak berkaitan):
 - Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
 - Restrukturisasi Sektor Kehutanan
 - Penguatan Kapasitas Nasional dalam Proses Internasional

Format Proposal :

1. Abstraksi (1 hal, maks 100 kata)
2. Latar Belakang (1/2 hal, 150 kata)
3. Tujuan (30 kata)
4. Relevansi thdp Komponen MFP (1/2 hal, maks 40 kata)
5. Metode/Pendekatan Analisis (1/2 hal, maks 150 kata)
6. Penerima Manfaat (output, outcome, impact) (1/2 hal, maks 100 kata)
7. Alur Pikir (1 hal)
8. Tata Waktu Kegiatan (1 hal)
9. Rincian Anggaran (1 hal)
10. Lampiran

Bagan 2. Alur Pengajuan Proposal :



Tabel 4. Beberapa Contoh Kegiatan yang Didanai oleh MFP-DFID

No.	Judul Proposal	Pengusul
1	Pemetaan Partisipatif dalam rangka Pemantapan Kawasan TN. Gunung Merapi dan TN. Gunung Merbabu	BPKH Wilayah XI
2	Rancangan Pengelolaan Kawasan Lintas Wilayah (Kabupaten Boven Digul dan Pegunungan Bintang) dengan pendekatan Penataan ruang dan Partisipatif	BPKH Wilayah X
3	Identifikasi Potensi Kegiatan Ekoturisme pada Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung di kabupaten Sambas	BPKH Wilayah III
4	Pembuatan Rancangan Hutan Rakyat Tanaman Gerucuk di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat	BPKH Wilayah III
5	Pengelolaan data Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan melalui Penyusunan Database dan Pelatihan Database Management System	Pusat Pembentukan Wilayah
6	Seminar Nasional IV Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Tema: Susut Sumberdaya Alam dan Dampaknya terhadap Pembangunan di Era Otonomi Daerah)	Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan
7	Diseminasi Hasil Dialog Internasional Bidang Kehutanan dalam rangka Penguatan Kapasitas Nasional untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Biro KLN & Investasi
8	Identifikasi Stakeholder dan isu-isu penting kehutanan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam bingkai program kehutanan di 5 propinsi	Pusdal Regional Wilayah II
9	Diklat Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat Sekitar Hutan	Balai Diklat Kehutanan
10	Sosialisasi dan Training CDM Kehutanan di Daerah	SAM IV

Contact Person :

Dr. Mike Harrison, UK Co-Director MFP-Dephut-DFID, Gedung BRI II Lt. 19, suite 1907, Jl. Jend Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210, Telp. 571-3316/3318
Fax. : 571-3420

V. VISI, MISI DAN PROGRAM NEGARA-NEGARA DONOR YANG TERKAIT KEPLANOLOGIAN

A. JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Latar Belakang

Dengan adanya gagasan untuk mempromosikan kerjasama internasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang, Pemerintah Jepang mendirikan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada tanggal 1 Agustus 1974 berdasarkan Undang-undang (UU) Badan Kerjasama Internasional Jepang, yang kemudian direstrukturisasi sebagai institusi yang mandiri secara administrative pada Oktober 2003 berdasarkan UU No. 136 tentang Institusi Administrasi Mandiri-Badan Kerjasama Internasional Jepang yang ditetapkan pada 6 Desember 2002.

JICA merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama teknik dengan Negara-negara berkembang berdasarkan atas kesepakatan bilateral antar-pemerintah secara resmi. Seluruh program kerjasama JICA dilaksanakan dalam bentuk bantuan hibah.

Kantor JICA pada awalnya didirikan pada 1969 sebagai kantor perwakilan dari bagian kerjasama teknik luar negeri (OTCA) yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi JICA pada tahun 1974 dan selanjutnya mengalami restrukturisasi pada tahun 2003.

Indonesia merupakan salah satu Negara penerima bantuan hibah bilateral Jepang terbesar berdasarkan besarnya jumlah dana yang telah disalurkan secara kumulatif sampai 2005. Sejak awal pelaksanaan kerjasama, secara akumulatif telah terkirim sejumlah 33.570 peserta Indonesia peserta Indonesia untuk mengikuti program pelatihan di Jepang, dan 10.300 tenaga ahli Jepang dan 18.972 anggota tim survey Jepang telah ditugaskan ke Indonesia.

Tujuan

Tiga tujuan utama dalam pelaksanaan kerjasama antara lain:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih luas melalui beberapa program diantaranya program sukarela, program kemitraan, program pada lapisan bawah di negara-negara berkembang.
2. Penguatan bantuan perdamaian termasuk kerjasama dalam mencegah terjadinya konflik, keadaan bahaya, dan perbaikan pasca konflik.
3. Meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas melalui peninjauan program dari segi keefektifan biaya, dan peninjauan struktur organisasi untuk merealisasikan proses pembuatan keputusan yang lebih cepat, dalam hal transparansi dan akuntabilitas, JICA akan memberikan informasi kepada publik mengenai program dan kegiatan yang dilakukan.

Mekanisme Kerjasama

Bantuan JICA difokuskan pada pengembangan kapasitas termasuk pembangunan sistem, penguatan organisasi, dan pengembangan sumberdaya manusia. Program prioritas kerjasama di Indonesia untuk tahun 2004 adalah:

1. Perubahan struktur ekonomi untuk pemulihan stabilitas ekonomi
2. Pemerintahan yang bersih
3. Infrastruktur industri untuk pertumbuhan ekonomi yang lestari
4. Penguatan kemiskinan dan pengembangan sosial
5. Konservasi lingkungan

Tiga hal penting dalam pelaksanaan proyek JICA antara lain :

1. Pendekatan yang berorientasi lapangan
2. Keamanan
3. Efektifitas, efisiensi dan kecepatan

Dua pendekatan yang dilaksanakan JICA dalam proses kerjasama yaitu :

1. Pendekatan terhadap negara atau region yaitu pendekatan yang menciptakan sebuah kerangka kerja dengan seperangkat pendukung berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi negara penerima bantuan.
2. Pendekatan terhadap isu yang terjadi di negara penerima bantuan, yang bertujuan untuk memperbaharui kualitas dari bantuan yang diberikan mencakup keahlian termasuk juga dalam bagian sektor pembangunan

Bidang-bidang Prioritas Kerjasama JICA di Indonesia untuk tahun 2007

Pada tahun 2004, Pemerintah Jepang telah menyusun *Country Assistance Strategy* (CAS) atau strategi bantuan untuk pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia, yang dititikberatkan pada pencapaian tiga bidang utama: (1) pertumbuhan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor swasta, (2) membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan, (3) perdamaian dan stabilitas, dan membantu semaksimal mungkin inisiatif Pemerintah Indonesia dalam mendorong kemandiriannya. Salah satu fokus kegiatan tersebut adalah Pelestarian lingkungan.

JICA dipandang perlu untuk mempertahankan dukungannya terhadap langkah yang diambil pemerintah dalam pelestarian lingkungan sebagai bantuan yang tidak terikat dalam kerangka jangka waktu tertentu (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang)

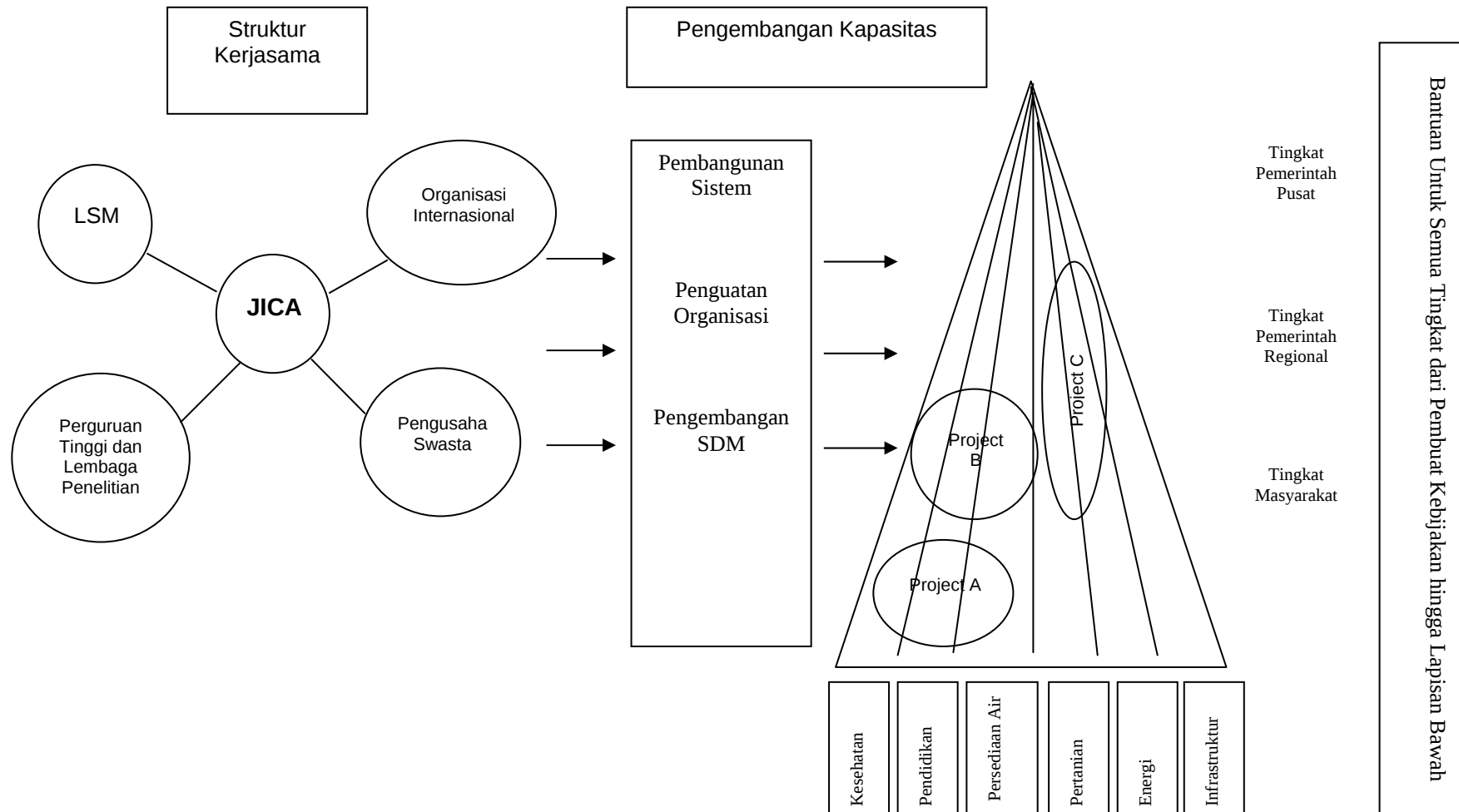
Program Bantuan Pelestarian Lingkungan

JICA telah mempertimbangkan untuk mempertahankan dukungannya terhadap program ini dengan memfokuskan pada :

1. Pelestarian alam dengan penekanan pada pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan sumberdaya hutan termasuk pelestarian hutan bakau, pengelolaan taman nasional, dan pengembangan kapasitas dalam menangani kebakaran hutan,
2. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dengan penekanan peningkatan kapasitas dalam hal pelestarian sumberdaya lokal, monitoring lingkungan, termasuk berbagai langkah dalam menghadapi pemanasan global

Salah satu contoh program ini adalah Proyek Penguatan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (GHNSP-MP) yang pertama kali diluncurkan pada Pebruari 2004 sebagai suatu proyek kerjasama 5 tahun antara Departemen Kehutanan (Dephut) dan JICA dengan tujuan menguatkan pengelolaan Taman Nasional Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan hasilnya dapat digunakan pada taman nasional lainnya di Indonesia.

Bagan 3. Skema Pendekatan Bantuan JICA



Bentuk-bentuk Kerjasama JICA

- **Proyek Kerjasama Teknik (TCP)**

Dalam rangka pelaksanaannya, JICA menyelaraskan berbagai sumberdaya (seperti personel, sarana, prasarana) yang dimiliki baik oleh pihak Jepang maupun pendamping pihak Indonesia untuk melaksanakan suatu kegiatan kerjasama yang telah disepakati bersama dalam suatu periode tertentu. Bentuk kerjasama ini berorientasi pada hasil yang terdiri dari berbagai pilihan komponen bantuan, seperti pengiriman tenaga ahli Jepang untuk pelatihan, atau penyediaan peralatan yang diperlukan, dan sebagainya.

- **Studi Pembangunan**

JICA melaksanakan studi kelayakan dan efektifitas rencana pelaksanaan suatu rencana induk atau usulan proyek pembangunan (seperti rencana jalan pelabuhan, pengembangan kawasan) di tingkat nasional maupun daerah, dan merekomendasikan hasilnya dalam suatu laporan studi pembangunan. Laporan ini meliputi rencana induk yang akan digunakan sebagai cetak biru dalam program pembangunan di Indonesia.

- **Bantuan Hibah (GA), (kontribusi dalam survei awal; mempromosikan usulan sebagai acuan untuk persetujuan pelaksanaan suatu proyek)**

JICA bertanggungjawab untuk melaksanakan studi awal dalam mempromosikan usulan bagi bantuan hibah yang dibiayai Pemerintah Jepang termasuk pengadaan prasarana sosial dasar yang dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia (seperti sekolah, rumah sakit). Disamping itu JICA juga dapat memberikan arahan dalam tahap pelaksanaannya serta memfasilitasi pelaksanaan konstruksi atau pengadaan peralatan untuk menjamin kesinambungan dan efektifitas bantuan.

- **Penerimaan Peserta Pelatihan**

Para personil di bidang teknik, serta pejabat administrasi Pemerintah Indonesia diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan baik di Jepang, di Indonesia (domestik), maupun di negara berkembang lainnya. Melalui program pelatihan ini diharapkan bahwa para peserta dapat memperoleh pengetahuan yang berguna dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan kapasitasnya sendiri, organisasinya, serta masyarakat secara keseluruhan.

- **Kerjasama lanjutan / Follow-UP (F-COP)**

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung upaya kemandirian berbagai institusi pelaksana kerjasama untuk mempromosikan keberlanjutan dan kesinambungan dari proyek kerjasama teknik JICA dan bantuan hibah Pemerintah Jepang yang telah selesai melalui penyediaan program bantuan lanjutan yang diperlukan dalam bentuk peralatan fisik maupun berbagai kegiatan pendukung seperti seminar, workshop, dan penyusunan manual.

- **Kerjasama Selatan-Selatan: Menuju Indonesia sebagai negara donor baru**

Kerjasama Selatan-Selatan merupakan: Suatu kerjasama timbale-balik yang ditujukan untuk membina pembangunan yang mandiri, memperdalam hubungan antar negar-negara berkembang melalui kerjasama teknik dan ekonomi.” Program kerjasama Selatan-Selatan yang didukung oleh JICA ini adalah Program Pelatihan Internasional di Negara Berkembang (TCTP) dan Program Pengiriman Tenaga Ahli ke Negara Berkembang (TECP).

Formulir Aplikasi JICA

Berikut beberapa formulir aplikasi yang digunakan untuk JICA's Technical Cooperation.

Tabel 5. Contoh Format Usulan ke JICA (PBIS)

Project Brief Information Sheet (PBIS)				2008
Title of the Project				
Relevant Sector				
Type of Cooperation Scheme		1. Technical Assistance (expert, training, et al), 2. Development Study 3. Grant financial aid, 4. others		
Name of the Ministry, Directorate (or Local Government)		Person in Charge	Name: Title: Tel: e-mail:	
Project Site (including name of Province)				
Description of Project	Project Purpose			
	Output (Expected Achievement)			
	INPUT	Input from Indonesia side		
		Expected Input from Japanese side		
Additional Explanation (Relation with GOI policy such as PROPENAS, REPETA, and JICA's development issues et al)				
BAPPENAS		Date	Ref. No.	Mark
JICA		Date	Ref. No.	Mark

Tabel 6. Application Form for Japan's Technical Cooperation

APPLICATION FORM FOR JAPAN'S TECHNICAL COOPERATION			
1. Date of Entry	:	Day	Month Year
2. Applicant	:	The Government of	
3. Project Title	:		
4. Implementing Agency	:		
Address	:		
Contact Person	:		
Telp. No.	:		Fax. No. :
E-mail	:		
5. Background of the Project	(Current condition of the sector, Government's development policy for the sector, issues and problems to be solved, existing development activities in the sector etc)		
6. Outline of the Project			
(1) Overall Goal	(Development effect expected as a result of achievement of the Project Purpose in several years after the end of the project period)		
(2) Project Purpose	(Objective expected to be achieved by the end of the project period, elaborate with quantitative indicators if possible)		
(3) Outputs	(Objectives to be realized by the Project Activities in order to achieve the Project Purpose)		
(4) Project Activities	(Specific actions intended to produce each output of the project by effective use of the input)		
(5) Input from the Recipient Government	(Counterpart personnel - identify the name and position of the project manager – support staff, office space, running expenses, vehicle, equipment, etc.)		
(6) Input from the Japanese Government	(Number and qualification of Japanese experts, training – in Japan and in-country courses, seminars and workshops, equipment, etc)		
7. Implementation Schedule			
Month	Year	--	Month Year
8. Implementing Agency	(Budget, staffing etc)		
9. Related Activities	(Activities in the sector by the recipient government, other donors and NGOs)		
10. Gender Consideration	(Any relevant information of the project from gender perspective)		
11. Environmental and Social Considerations	(Please fill in the attached screening format)		
12. Beneficiaries	(population for which positive changes are intended directly and indirectly by implementing the project)		
13. Security Conditions			
14. Others			

Tabel 7. Formulir Aplikasi Technical Cooperation Project

Form S1	
TECHNICAL COOPERATION BY THE GOVERNMENT OF JAPAN PROPOSAL In connection with the Silver Expert Programme of Japan referred to in the Record of Discussions made by Japan International Cooperation Agency and <u>Sekretariat Kabinet of INDONESIA</u>, dated <u>April 14</u>, 1997 the Government of <u>JAPAN</u> hereby proposes the dispatch of a silver expert in the field of _____ to the Government of Japan. Notes—The careful completion of this proposal form will avoid much reference back and lead to speedier action.	
1. Background Information This section should show as precisely as possible the general nature of the project for which the silver expert required, stating whether it comes within the Government's development programme. It is important to indicate whether the project is a new enterprise or whether it was started previously. In the latter case, any assistance received under other technical cooperation programmes (e.g. under United Nations auspices) should be stated. With regard to industrial enterprises, some impression of the size is important and the output and number of workers to be employed are useful indications. The type of process, make and age of industrial or scientific equipment with which the silver expert will be concerned should be specified. In the case of academic establishments, it is an advantage to know the number of annual intake of students, their level of attainment, numbers and status of existing staff and details of any research facilities and the level of research being undertaken (copies of brochures, annual report, financial statements, calendar, syllabus of institution etc. should be attached where applicable).	
2. Specification for the post.* (a) Post title (b) Duties for which the silver expert will be responsible. These should preferably be listed, and It is important to give as much detail As possible. (c) Authority to whom silver expert will be responsible (d) Qualification and experience required and approximate age limits (e) Number of personnel required.	
3. In the case of continuous project, give name and particulars of understudy or counterpart who is to work with the silver expert.	
4. Terms and condition of appointment : (a) Duration (b) Actual place of employment, nearest town and post office (c) If living accommodation to be provided, state whether furnished or unfurnished, and whether suitable for married man with family. : (1) daily allowance for food if accommodation only provided. (2) daily rate for accommodation and food if neither are provided in kind.	
*It is essential that full particulars should be given. If the space provided is inadequate, they should be given on a separate sheet.	

Form S1**4 Term and condition of appointment (contd)**

(d) daily and nightly rates of subsistence payable when away from base on duty

(e) Are costs of internal travel paid or car provided ?

(f) What leave arrangements are suggested?

(g) Extent to which free hospital and medical treatment is to be provided for the silver expert and his accompanying dependents, if any

(h) Shall the silver expert be exempted from the payment of income tax and charges of any kind imposed on or in connection with any allowances to be remitted from overseas ?

Refer to the
Record of
Discussions

(i)

(1) Shall the silver expert be exempted from the payment of customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with the importation of equipment, machinery, materials and medical supplies as well as personal and household effects belongings to the silver expert and his family, including one refrigerator, one sewing machine, one radio and other electrical appliances?

Refer to the
Record of
Discussions

(2) In case a car is not provided to the silver expert by the host government, shall the silver expert be exempted from the payment of customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with the importation of a car?

(j) Does host government under take to indemnify silver expert in respect of damages awarded against him for actions performed in the course of his official duties?

(k) Approximate date on which the silver expert is required to arrive in receiving country

(l) Any other information

5. Previous steps, if any, to fill the post :

If any previous attempt has been made to fill the post from any external source (UN, Specialized Agency or other) please indicate :

(a) To whom application was addressed, with date

(b) Result or present stage of negotiations

(c) Are other experts working in this area in associated projects or have there been experts working in this field previously? If so, are any reports by these expert available?

6. Correspondence :

Name, postal and telegraphic address of official to whom correspondence regarding this application should be forwarded

Signed.....

Name.....

Date:.....

On behalf of the Government of
.....

Tabel 8. Formulir Aplikasi untuk Rencana Pengembangan Studi

APPLICATION FORM FOR JAPAN'S DEVELOPMENT STUDY PROGRAM	
Date of entry: month _____ year	
Applicant: the Government of	
1. Project digest	
(1) Project Title:	
*Enter the project title in English (Spanish or French).	
(2) Location (province/county name):	
(city/town/village name):	
from the metropolis : about _____ hours' ride/flight	
(3) Implementing Agency	
Name of the Agency:	
*Enter the name of the implementing agency including such details as the name of the bureau or department.	
Number of Staff of the Agency:	
(on a category basis)	
Budget allocated to the Agency :	
*Attach an organizational chart, and mark the department responsible for the study.	
(4) Justification of the Project	
*Provide detailed information of the project regarding the items below.	
-Present conditions of the sector:	
-Sectoral development policy of the national/local government:	
-Problems to be solved in the sector:	
-Outline of the Project:	
-Purpose (short-term objective) of the Project:	
-Goal (long-term objective) of the Project:	
-Prospective beneficiaries:	
(Population for which positive change are intended directly and indirectly by implementing the project, and gender disaggregated data, if available)	
-the Project's priority in the National Development Plan / Public Investment Program :	
(5) Desirable or Scheduled time of the commencement of the Project:	
month _____ year	
(6)Expected funding source and/or assistance (including external origin) for the Project:	
*Describe the concrete policies for the realization of the project, and enter the prospects for realization and funding sources.	
(7) Other relevant Projects, if any.	
(8) Any relevant information of the project from gender perspective.	
2. Terms of Reference of the proposed Study	
*Please fill in (1) and (2) below, paying particular attention to the following items.	
-In the case that a study was conducted in the same field in the past, describe the grounds for requesting this study, the present status of the previous project, and the situation regarding the technology transfer.	
-Whether there are existing studies regarding this requested study or not.	
-Coordination with other economic and technical cooperation from Japan	
(1) Necessity/Justification of the Study:	

(2) Necessity/Justification of the Japanese Technical Cooperation:

(3) Objectives of the Study:

- *Describe the objectives of the study in detail. Also, indicate who will benefit from the study in as much detail as possible, including gender disaggregated data and describe the beneficial effect in terms of quantity. Enter in a concise manner the goal expected to be achieved in the future by conducting the study.
- *When the requested study is the only input scheme there is in the cooperation program, enter the same sentences given in the "Objective of the Cooperation Program" in the summary sheet. When more than one scheme is requested including this one, describe clearly the role of the requested study.

(4) Area to be covered by the Study:

- *Enter the name of the target area for the study and attach a rough map to the documents submitted. The attached map should be at a scale that clearly shows the project site. Mark the site in red.

(5) Scope of the Study:

- *Enter in a concise manner using an itemized statement.

(6) Study Schedule:

- *Enter the time/period of the study.

(7) Expected Major Outputs of the Study:

(8) Possibility to be implemented / Expected funding resources:

(9) Environmental and Social Considerations

- *Please fill in the attached screening format.

(10) Request of the Study to other donor agencies, if any:

- *Please pay particular attention to the following items:
 - Whether you have requested the same study to other donors or not.
 - Whether any other donor has already started a similar study in the target area or not.
 - Presence/absence of cooperation results or plans by third-countries or international agencies for similar projects.
 - In the case that a study was conducted in the same field in the past, describe the grounds for requesting this study, the present status of the previous project, and the situation regarding the technology transfer.
 - Whether there are existing studies regarding this requested study or not. (Enter the time/period, content and concerned agencies of the existing studies.)

(11) Other relevant information

- *Enter relevant information other than that described above, if any.

3. Facilities and information for the Study

- (1) Assignment of counterpart personnel of the implementing agency for the Study:
(Number, academic background, etc.)
- (2) Available data, information, documents, maps, etc. related to the Study:
(Please attach the list.)
- (3) Information on the security conditions in the Study Area:

4. Global Issues (Gender, Poverty, etc.)

- (1) Women as main beneficiaries or not.
- (2) Project components which require special considerations for women (such as gender difference, women specific role, women's participation), if any.
- (3) Anticipated impacts on women caused by the Project, if any.
- (4) Poverty alleviation components of the Project, if any.

(5) Any constraints against the low-income people caused by the Project.

5. Undertaking of (the recipient country)

- (1) To facilitate the smooth conduct of the Study; the Government of (the recipient country) shall take necessary measures:
 - 1) To permit the members of the Team to enter, leave and sojourn in (the recipient country) for the duration of their assignments therein and exempt them from foreign registration requirements and consular fees;
 - 2) To exempt the members of the Team from taxes, duties and any other charges on equipment, machinery and other material brought into (the recipient country) for the implementation of the Study;
 - 3) To exempt the members of the Team from income tax and charges of any kind imposed on or in connection with any emoluments or allowances paid to the members of the team for their services in connection with the implementation of the Study;
 - 4) To provide necessary facilities to the Team for the remittance as well as utilization of the funds introduced into (the recipient country) from Japan in connection with the implementation of the Study;
- (2) The Government of (the recipient country) shall bear claims, if any arises, against the members of the Team resulting from, occurring in the course of, or otherwise connected with, the discharge of their duties in the implementation of the Study, except when such claims arise from gross negligence or willful misconduct on the part of the team.
- (3) (The implementing Agency) shall act as counterpart agency to the Japanese Study Team and also as coordinating body in relation with other governmental and non-governmental organizations concerned for the smooth implementation of the Study.
- (4) (The implementing agency) shall, at its own expense, provide the Team with the following, in cooperation with other organizations concerned:
 - 1) Security-related information on as well as measures to ensure the safety of the Team;
 - 2) Information on as well as support in obtaining medical service;
 - 3) Available data and information related to the Study;
 - 4) Counterpart personnel;
 - 5) Suitable office space with necessary office equipment and furniture;
 - 6) Credentials or identification cards; and
 - 7) Vehicles with drivers.
- (5) (The implementing Agency) will, as the executing agency of the project, take responsibilities that may arise from the products of the Study.

*In the case that Detail Design Study is requested.

The Government of (the recipient country) assures that the matters referred to in this form will be ensured for the smooth conduct of the Development Study by the Japanese Study Team.

Signed:

Title:

On behalf of the Government of

Date:

Tabel 9. Formulir Aplikasi Japan's Grant Aid General and Fisheries

Application Form for Japan's Grant Aid General and Fisheries	
1. Date	
2. Project title, Program title, Sector / Sub-sector	
3. Background of the request	
(1) Relations between the project / program and the national development plan (Name of the national development plan and the position of the proposed sector in the pl	
(2) Relations between the project / program and the sector development plan (Name of the sector development plan and the position of the proposed project / program / sub-sector in the plan)	
(3) Current situation of the proposed sector.	
4. Objectives of the project / program, including the importance, necessity, and urgency of the project / program in the light of the current situation of the proposed sector	
5. Outline of the project/ program	
(1) Outline of requested facilities or/and equipment	
(2) Rough request amount. Circle one: "less than US \$ 5,000,000", or "between US \$ 5,000,000 and US \$ 10,000,000", or "over US \$ 10,000,000"	
(3) Benefits /beneficiaries and expected results of the project / program	
(4) Location (Attach maps if available)	
(5) Requested schedule of implementation, and its reason	
6. Name of Implementing agency	
7. Relation with other assistance schemes of Japan's ODA	
(1) Development study	
(2) Technical cooperation (expert, training, equipment)	
8.Environmental and social considerations	
(Please fill in the attached screening format)	
9. Request amount of the project	
10. Any relevant information of the project from gender perspective.	
(Is there any significant gender gap? Does the project benefit both men and women?)	
11.The detailed contents of the project	
(1) Facility	
1) Site address	
2) Rationale for the selected sites (Please specify the priority of the candidate sites)	
3) The number and the size of the facility	
4) Cost of construction (Cost breakdown)	
5) Lay out plan (if available)	
6) Specification of construction materials (if any)	
(2) Equipment	
1) Site address to be installed	
2) Function	
3) Names of main equipment	
4) Cost of purchase (Cost breakdown)	
5) Specifications, the numbers, and unit prices (if available)	
6) Invoice (if available)	
(3) How to operate and maintain the facility / equipment, including the staff and technical level of the responsible organization	
(4) Preparation and environment of site	
1) Land secured or to be secured	
2) Leveling, drainage, availability of electricity, water, and telephone	
3) Natural condition	
4) Security condition	
12. Aid by third countries or international organizations in the related field	
	(END)

**Tabel 10. Daftar Kegiatan Kerjasama JICA di Indonesia
Program Dukungan Bagi Pelestarian Lingkungan**

Pelestarian Alam		
TCP	Peningkatan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Kapasitas Penelitian di bidang Keanekaragaman Hayati	2006 – 2008
TCP	Promosi Teknik Propagasi Masa Spesies Pohon Lokal untuk Proses Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan	2003 – 2007
DS	Studi Pengelolaan Hutan Berbasis Pengumpulan Karbon di Indonesia	2001 – 2006
TCP	Proyek Pencegahan Kebakaran Hutan melalui Prakarsa Masyarakat di sekitar Wilayah Penyangga	2001 – 2006
TCP	Proyek Penguatan Pengelolaan Taman nasional Gunung Halimun-Salak (GHSNP-MP)	2004 – 2009
TCP	Pelatihan Internasional tentang Pengembangan Tanaman Hutan	2005 – 2007
TCP	Program Sub Sektor mengenai Hutan Bakau	2007 – 2010
CEP	Pemberdayaan Masyarakat Pantai melalui Rehabilitasi Hutan Bakau dan Pelestarian Daerah Pantai Berbasis Ekonomi di Sumbawa Barat, NTB	2004 – 2007
JEP	Program Kemitraan Pelestarian Jalak Bali	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan		
TCP	Proyek Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan	2006 – 2009
TCP	Pengembangan Program, Kebijakan dan Alat Pendukung di Bidang Eco Label	2007
CEP	Pengelolaan Limbah Rumah Tangga melalui Pelaksanaan Prinsip 4R oleh Masyarakat Kelurahan Susukan, Jakarta	2006 - 2008

JICA'S Indonesia Office :

Plaza BII Tower II, 27th floor
 Jl. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
 Tel (62-21) 390 7533 (hunting)
 Tel (62-21) 390 7536
 Homepage : www.jica.go.jp
 E-mail : pr@jica.or.id

B. INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO)

Latar Belakang

ITTO merupakan lembaga yang dibentuk pada pertengahan tahun 1986 yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian seluruh dunia terhadap kondisi hutan tropis. ITTO mengembangkan dokumen kebijakan kesepahaman internasional untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari, konservasi hutan, dan membantu negara tropis membuat kebijakan bagi kondisi lokal dan untuk melaksanakan kebijakan tersebut berupa proyek lapangan. Dalam kaitan tersebut ITTO juga mengumpulkan, menganalisis, dan menyebar luaskan data produksi, dan perdagangan kayu tropis, dan kegiatan lain yang ditujukan pada pengembangan industri dan masyarakat.

Proyek ITTO merupakan sarana utama untuk membantu negara anggota dalam menerapkan inisiatif-inisiatif kebijakan dengan sasaran:

1. Peningkatan transparansi pasar kayu
2. Promosi kayu tropis asal hutan lestari
3. Konservasi sumberdaya kayu tropis
4. Promosi pengelolaan hutan lestari
5. Promosi hasil olahan lanjutan kayu tropis
6. Efisiensi industri

Tujuan :

1. Memberikan wadah konsultasi, kerjasama, dan kebijakan
2. Meningkatkan praktek non-diskriminatif perdagangan kayu
3. Berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kapasitas anggota dalam pengelolaan hutan yang lestari
5. Mendorong ekspansi dan diversifikasi perdagangan kayu tropis
6. Mendukung penelitian dan pengembangan dalam rangka pemanfaatan kayu yang lestari
7. Memberikan kontribusi dalam pengembangan keahlian dan mekanisme pembiayaan sektor kehutanan
8. Meningkatkan pemantauan pasar dan perdagangan kayu
9. Mendorong produksi kayu dan pengelolaan lanjutan (*advance management*) dari hutan lestari
10. Mendorong anggota dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan dan reforestrasi (HTI) berbasis masyarakat
11. Meningkatkan pemasaran dan distribusi ekspor kayu dari hutan lestari
12. Mendorong terbukanya akses dan alih teknologi serta kerjasama teknik yang saling menguntungkan

13. Mendorong terjadinya pertukaran data dan informasi mengenai pasar kayu internasional

Visi

1. Transparansi pasar kayu
2. Promosi kayu tropis asal "Sustainable Forest Management"
3. Konservasi kayu tropis
4. Pengelolaan hutan lestari
5. Efisiensi Industri

Misi

Memfasilitasi diskusi, konsultasi dan kerjasama internasional yang berhubungan dengan penggunaan dan perdagangan kayu tropis serta pengelolaan sumberdaya yang lestari.

Project (dan Pre-Project) ITTO :

- Dilakukan sesuai *project cycle*,
- Dinilai secara objektif
- Bebas dalam memilih konsultan, pembelian barang, dsb.

Yokohama Action Plan 2002-2006

- Panduan bagi organisasi dalam menjalankan perannya berdasarkan ITTA 1994
- *Updating Liebreville Action Plan + Objective Year 2000 + New Elements.*
- Ada penajaman fokus dari 9 goals (*Liebreville*) menjadi 6 goals

Action Plan Goals

1. Economic Information and Market Intelligent.
 - Goal 1: Improve transparency on the international market
 - Goal 2: Promote tropical from sustainably managed resource
2. Reforestation and Forest Management
 - Goal 1: Support activities to secure the tropical timber resource base
 - Goal 2: Promote sustainable management of tropical forest resource
3. Forest Industry
 - Goal 1: Promote increase and further processing of tropical timber from sustainable sources
 - Goal 2: Improve industry's efficiency of processing and utilization of tropical timber from sustainable resource

Bidang Sasaran

1. Economic Information and Market Intellegencies (MI)
 - Meningkatkan transparansi perdagangan kayu
 - Meningkatkan perdagangan kayu tropis dari hutan lestari
2. Reforestation and Forest Management (F)
 - Mendukung kegiatan pengamanan hutan
 - Meningkatkan pengelolaan hutan lestari
3. Forestry Industry (I)
 - Mendorong peningkatan industri dan pengolahan lanjutan kayu
 - Meningkatkan efisiensi pengolahan dan pemanfaatan kayu tropis

Bantuan Proyek

1. Diusulkan melalui tiga komite : MI, F, I
2. Sejak tahun 1997 – 2006 telah membiayai 360 proyek dengan nilai USD 300 juta
3. Bentuk bantuan
 - Scholarship/fellowship
 - Penelitian
 - a. Pre-Project Document (PPD)
 - b. Project Document

Agenda Pengajuan Usulan

1. Dua kali dalam setahun (Mei dan November)
2. Dinilai oleh Expert Panel ITTO pada bulan Juli dan Januari setelah lolos dari *National Expert Panel* sebagai *Clearing House* (KLN)
3. Endorsment dari Menteri Kehutanan
4. Proposal kategori I, disetujui sidang ITTC berikutnya pada awal Mei dan awal November
5. Catatan : Hasil review selalu dikirim ke proponent dengan mencantumkan alasan penolakan atau perbaikan

Tata Cara Pengajuan Proposal

1. Proposal ditulis sesuai dengan format ITTO dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol.
2. Diajukan ke Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN), Departemen Kehutanan untuk mendapatkan endorsment dari Menhut
3. Dibahas di Pokja KLN sebagai National Clearing House
4. Diajukan ke Direktur eksekutif ITTO dalam bentuk hardcopy (5 eks) dan electronic copy

Tata Waktu Pengajuan Proposal (Tentative)

1. 28 November : Batas akhir penerimaan pre-proposal atau proposal baru yang telah direvisi
2. 9 December : seluruh proposal dikirim ke seluruh expert panel sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh penyusun proposal
3. 13 Januari : pengiriman terjemahan dalam bahasa Inggris untuk proposal yang ditulis dalam bahasa Spanyol dan Prancis ke seluruh *expert panel*
4. 6 – 10 Februari : pertemuan *expert panel*
5. 17 Februari : pengiriman komentar expert panel ke seluruh pengusul proposal
6. 13 Maret : Batas akhir penerimaan proposal yang telah direvisi sesuai dengan rekomendasi expert panel
7. 17 April : seluruh proposal yang direkomendasikan dan laporan expert panel dikirim ke ITTO Homepage
8. Mei – Juni : ITTC meeting untuk penentuan pembiayaan

Contoh Kegiatan

Dalam mencapai tujuannya ITTO bekerja berdasar konsensus dan melalui 2 tipe kegiatan yaitu: a) penyusunan kebijaksanaan dan b) aktivitas proyek. Lampiran 1. Proyek-proyek ITTO yang telah berjalan.

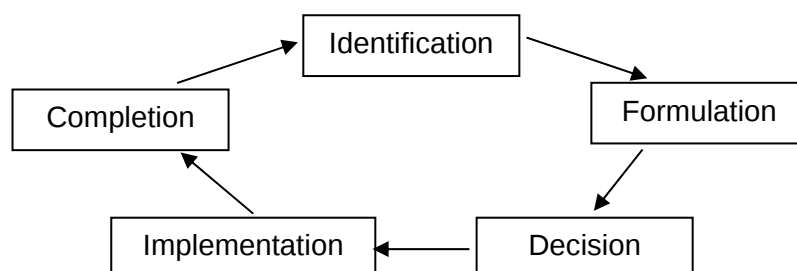
Pendanaan dan Keanggotaan

ITTO bermarkas di Yokohama kini beranggotakan 58 negara yang terdiri dari 33 negara produsen (Brazil, Indonesia, Malaysia, vote terbesar) dan 25 negara konsumen (tahun 2000) meliputi 95% volume perdagangan kayu tropis dan 75% dari luas hutan tropis. Sebagai anggota, selama tiga tahun terakhir Indonesia telah membayar kontribusi sebesar US\$ 314,600 (2002) US\$ 341,040 (2003) US\$ 374,596 (2004) US\$ 420,070 (2005)

Mekanisme Kerjasama

Mekanisme kerjasama yang dilakukan harus berdasarkan pada *ITTO Manual for Project Formulation* pada Bagan 4 berikut.

Bagan 4. ITTO Manual for Project Formulation



Tabel 11. Phase dalam Mekanisme Kerjasama

Phase	Principal Outputs
Identification	Project Idea
Formulation	Project Proposal
Decision	Ex-ante Evaluation Project Appraisal Report Project Document Committee Decision Project Agreement
Implementation	Project Progress Report Mid-term Evaluation
Completion	Project Completion Report Ex-post Evaluation Report

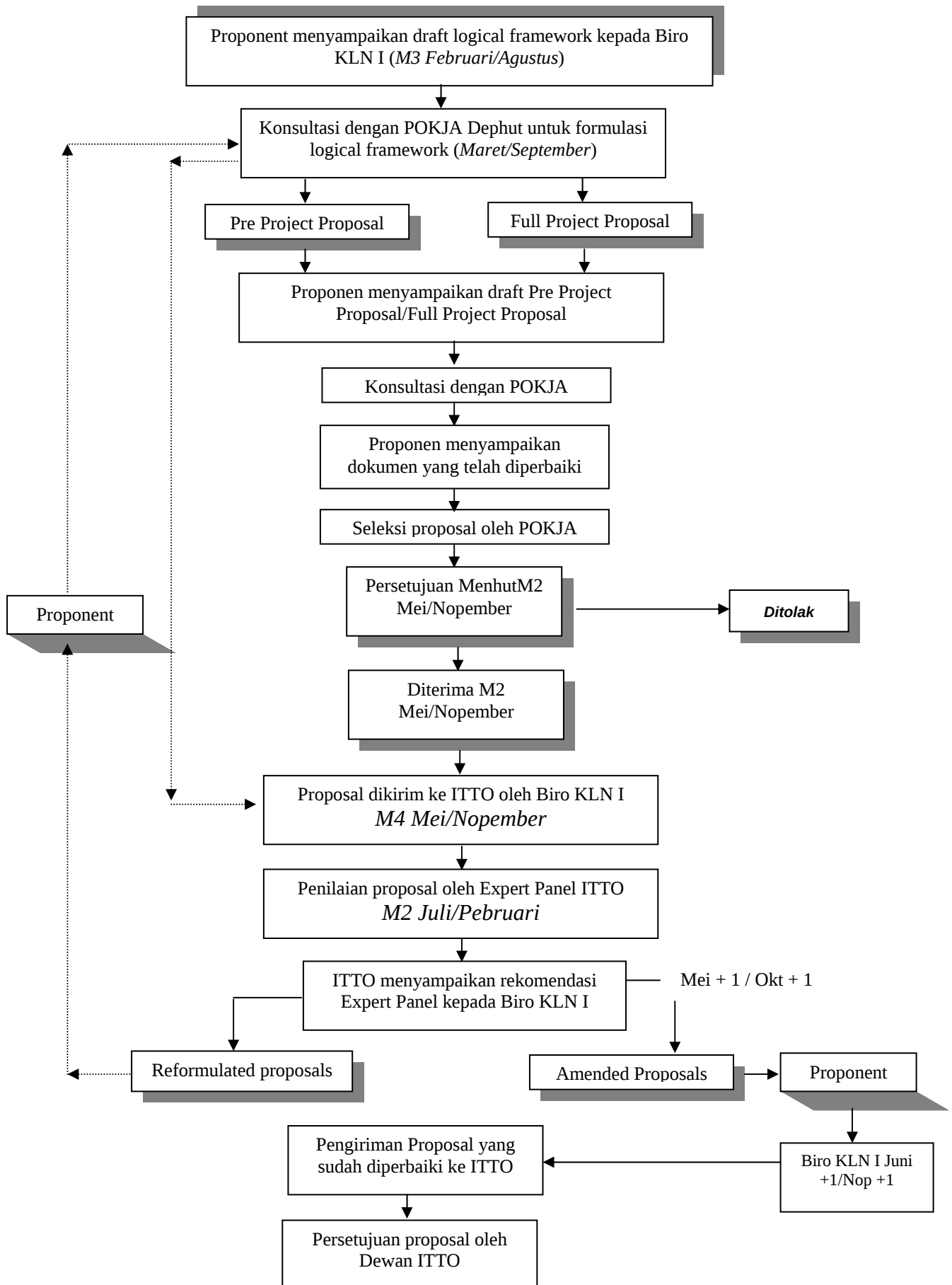
Manfaat Menjadi Anggota

Indonesia sampai dengan saat ini telah melaksanakan 31 proyek ITTO (terminated project) senilai US\$ 23,5 juta. Dalam kurun waktu 1997 – pertengahan 2003, bantuan ITTO yang diterima Indonesia melalui kegiatan proyek sebesar US\$ 10,99 juta atau 13,4% dari US\$ total dana ITTO yang diperuntukan bagi pelaksanaan proyek-proyek sebesar US\$ 96,43 juta (*Special Account* dan *Bali Partnership Fund*). Saat ini sedang persiapan lima proyek yang telah disetujui dewan ITTO dan sudah mendapatkan pendanaan sebesar US\$ 1,8 juta. Negara-negara Brazil dan Malaysia, yang merupakan negara dengan vote terbesar selain Indonesia, masing-masing mendapatkan 9,3% dan 4,7%. Peru, China dan Columbia, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar 8,9%; 7,3% dan 4,9%. Negara-negara lainnya menerima bantuan berkisar 0,1% - 4,7%.

Alamat Kantor :

International Tropical Timber Organization
International Organization Center % th Floor
Pacifio – Yokohama, 1-1-1, Minato-Mirai, Nishi-Ku
Yokohama, 222-0012, Japan.
E-mail : itto@itto.or.jp

Bagan 5. Diagram Proses Pengusulan Proyek ITTO



Catatan : +1 = bulan yang sama pada satu tahun berikutnya

C. DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ)

Latar Belakang

Lembaga kerjasama teknis Jerman, Deutsche Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), adalah salah satu organisasi konsultasi terbesar di dunia untuk pengembangan kerjasama, dibentuk pada tahun 1974. Sebagian besar didanai oleh Kementrian Kerjasama Ekonomi. Kerjasama teknis bilateral sudah terlaksana hampir lebih di 130 negara.

Tujuan

1. Mewujudkan reformasi kebijakan kehutanan untuk meningkatkan kerangka kondisi penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari di tingkat propinsi dan kabupaten.
2. Pengembangan *National Forest Programme* melalui proses konsultasi dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait secara bersama-sama dan untuk memulai pelaksanaannya.

Misi

Menjamin keamanan penduduk dunia di masa depan, kesejahteraan, kedamaian dan stabilitas, kesempatan yang sama, dan peraturan hukum

Contoh Kegiatan

Salah satu kegiatan GTZ adalah *Strengthening the management Capacity of the Ministry of Forestry*, SMCP-GTZ merupakan proyek kerjasama luar negeri yang dananya bersumber dari Republik Federal Jerman yang bersifat *grant* atau hibah, dengan dana pendamping yang berasal dari Pemerintah Indonesia (GoI) diberikan dalam bentuk *in kind* berupa penyediaan ruang kerja, fasilitas listrik dan kemudahan dalam pelayanan administrasi dan *custom* (kepabeanan

Kegiatan pokok SMCP-GTZ :

1. Pengembangan kapasitas institusi dan sumber daya manusia Departemen Kehutanan
2. Mendukung pengembangan strategi, konsep, *action plan* Lima Kebijakan Program Prioritas Departemen Kehutanan dan 12 komitmen internasional
3. Mendukung pelaksanaan *alternative financing mechanism* untuk SFM rehabilitasi, reboisasi dan konservasi terhadap lahan terdegradasi

Kerjasama SMCP-GTZ – Dephut

Kegiatan Fase 3 Mencakup :

1. Melatih staff pemerintahan pada tingkat nasional (Dephut, Depdagri, Bappenas, dll) dan kabupaten
2. Mendukung penyusunan kebijakan, strategi, aturan dan regulasi, serta mekanisme koordinasi antar Departemen
3. Memfasilitasi kegiatan multipihak
4. Mendukung penyusunan mekanisme dan pembentukan lembaga untuk pembayaran jasa lingkungan
5. Mendukung pengelolaab pengetahuan dan strategi untuk CDM dalam bidang kehutanan

Dana Bantuan

Dana bantuan yang disediakan meliputi 3 (tiga) phase, Phase I tahun 1997-2001, Phase II tahun 2001-2003, dan Phase III tahun 2003 – Jan 2005 yang diperpanjang sampai Desember 2005 dengan total dana sebesar Euro 1.100.000 untuk seluruh Indonesia.

Rencana Kegiatan 2006-2008 :

- Memberikan saran kepada instansi kehutanan nasional, propinsi dan kabupaten dalam hal peningkatan partisipasi multipihak dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan SDM dan pengembangan kelembagaan
- Memperkuat kelembagaan melalui peningkatan kapasitas, misalnya dalam bidang perencanaan tata ruang, perencanaan partisipatif dan kerjasama lintas sektoral
- Meningkatkan komunikasi/koordinasi untuk penyelarasan kebijakan dan peraturan antar sektor dan tingkatan

GTZ Office Jakarta

Deutsche Bank Build 20th Fl.
Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310
Tel : 021-3192 4007
Fax : 021 3192 4070
Website : www.gtz.de/indonesia

D. USAID

Latar Belakang

USAID merupakan lembaga bantuan pemerintah Amerika kepada Indonesia yang ditujukan untuk membantu penguatan Negara Indonesia yang moderat, stabil dan produktif. Bantuan teknis USAID meliputi; a) Pengembangan kualitas otonomi pendidikan dasar, b) Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar manusia, c) Mendorong efektifnya otonomi daerah dan pemerintahan demokrasi, dan d) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perbaikan pengelolaan sumber daya air serta perluasan akses layanan air bersih dan sanitasi.

Visi

Mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui perbaikan pengelolaan sumber daya air dan perluasan akses pelayanan air bersih dan sanitasi.

Misi :

- a. Mendukung pengelolaan lahan ramah lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati
- b. Rehabilitasi lahan kritis
- c. Perkembangan pertanian ramah lingkungan
- d. Fasilitasi penyusunan kebijakan publik bidang lingkungan
- e. Mendukung pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat
- f. Kampanye penyadaran lingkungan

Contoh - contoh Kegiatan

Salah satu program USAID adalah *Environmental Services Program* (ESP), ESP merupakan program yang mendedikasikan semua kegiatannya untuk mempromosikan kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan pengelolaan air serta memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Pencapaian misi ESP akan diselenggarakan melalui tiga komponen kegiatan utama yang saling terkait dan dilakukan secara terintegrasi. Tiga komponen tersebut adalah :

1. Pengelolaan DAS dan konservasi keanekaragaman hayati dengan melindungi sumber air baku (*Watershed Management Biodiversity Conservation*)

2. Penyediaan jasa lingkungan dengan meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat dan sanitasi (*Environmental Service Delivery*).
3. Pembiayaan dengan menumbuhkan alternative investasi pembiayaan bagi penyediaan jasa lingkungan dan kompensasi terhadap perlindungan lingkungan (*Environmental Service Finance*)

Pola Kerja ESP : Bekerja di Hulu dan Hilir, Mendukung Forum dan Orientasi Lapangan, Pola Kemitraan serta Mendukung Program Setempat.

Tabel 12. Contoh Kegiatan yang Sudah Berjalan dan yang akan Dilaksanakan Di berbagai Daerah

Daerah	Kegiatan	
	Sudah Berjalan	Waktu Dekat
Cianjur	Sosialisasi program ESP	Sustainable Livelihood Assessment
	Assessment Lokasi Kegiatan WSM	Workshop Multipihak
	Awareness Campaign, Workshop Konservasi TN Gede Pangrango	
Subang	Sosialisasi Program ESP	Sustainable Livelihood Assessment
	Assessment Lokasi Kegiatan WSM	Penyusunan Program Multipihak
	Workshop Strategi Pengelolaan SDA&LH	Geo-Hydrological Maps Burangrang Tangkuban Perahu dan Gede Pangrango
	Dibentuk Forum Multipihak DAS dan LH	Participatory Livelihood Assessment
NAD		Sosialisasi ESP (belum program) je Dishut, BKSDA, BP DAS
		Terlibat di Forum NGOs, khususnya dalam kegiatan WSM dan Biodiversitas
		Diskusi awal untuk kegiatan hutan lindung (B.Aceh), dan C.A Jantho, Tahura Cut Nya' Dien (A. Barat) dan isu illegal logging (campaign/dg forum) di A. Barat
Sumatera Utara	Sosialisasi dan Diskusi Program ESP (D. Serdang, Langkat, Karo)	Sustainability Community Development Assessment Training
	Persiapan Program AF (D. erdang)	Diskusi Tahura Bukit Barisan (Balai Prov)
	Sekolah Lapangan untuk Konservasi Alam	
	Diskusi dengan Dishut Karo Program Restorasi Gunung Sibayak	
Sumatera Barat	Sosialisasi, Launching, ESP "Round Table Discussion" Kab dan Kota	Assessment Calon Lokasi
	Talkshows di Radio	Working Group di Solok dan Tanah Datar
	Assessment Lokasi ES program	Sosialisasi ke Tingkat Kecamatan dan Nagari
	Mini ESP : Padang (sub DAS Batang Arau dan B. Kuranji)	

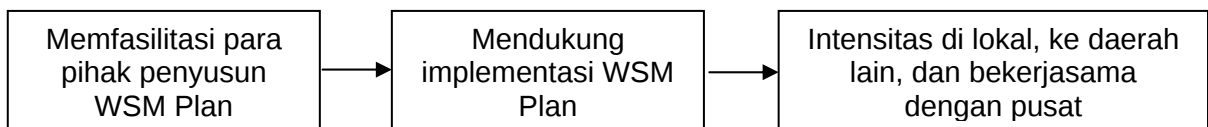
Jawa Timur	Identifikasi Tanaman untuk Gerhan	Need Assessment dengan Community
	Mulai diskusi pelatihan pembuatan community nursery	Support Forum
	Diskusi peta dengan BPKH. XI. Data sudah ada dan sedang diolah: jajaki data photo udara	
	Diskusi terkait kerjasama untuk mendukung multistakeholders sub DAS Sumber Brantas	

Dana Bantuan

Dana bantuan yang disediakan untuk tahun 2005-2009 adalah sebesar US\$ 330.000 yang mencakup wilayah Jabar, Jatim, Sumbar, Sumut, Kaltim, Papua dan Jakarta.

Mekanisme Kerjasama

Bagan 6. Mekanisme Kerjasama



V. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI BAPLAN TAHUN 2007 DAN TAHUN MENDATANG

Sesuai dengan Memorandum Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Bappenas No. 242/Dt. 8.2/04/2007 tanggal 24 April 2007 perihal Hasil *Need Survey JICA* Tahun 2007 bahwa usulan dari Badan Planologi Kehutanan telah mendapatkan persetujuan dengan Nilai A yaitu diterima dan efektif *Japan Fiscal Year 2007/08* dengan judul usulan yaitu :

A. SUPPORT ON FOREST RESOURCE MANAGEMENT THROUGH LEVERAGING SATELLITE IMAGE INFORMATION,

Project dengan judul ***Support on Forest Resource Management through Leveraging Satellite Image Information*** dengan skema TCP yang diusulkan oleh Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan kepada JICA pada tahun 2007 dan telah mendapatkan persetujuan dengan status *on going* di tahun 2008. Deskripsi lengkap mengenai Proyek ini dapat dilihat di *Project Disign Martix* (PDM) pada Tabel 13 dan *Project Summary* pada Tabel 14.

Tabel 13. Project Design Matrix (PDM)

Project name : Support on Forest Resource Management through Leveraging Satellite Image Information
Period of Cooperation : 3 years (2008/mid – 2010/mid)
Implementation Agency in Beneficiary Country : DG-Forestry Planning (BAPLAN), Ministry of Forestry (MoF)
Project Area : National (HQ) and BAPLAN Regional Offices (UPTs/BPKH)

NARRATIVE SUMMARY	OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS	MEANS OF VERIFICATION	IMPORTANT ASSUMPTIONS
Overall Goals To transfer technology of advanced monitoring and assessment system in line with human resource development for sustainable management to improve the quality of spatial data and information.	1. Forest resource condition can be improved by using new technology and methodology through advanced monitoring and assessment system. 2. High quality of staff to support advanced monitoring and assessment system will be available.	Official report of MoF and publications.	1. Continuity of images data availability. 2. There will be no significant reduction in counterpart budget for forest resources monitoring and assessment.
Project Purpose To enhance the capacity and capability of Ministry of Forestry in implementing forest monitoring and assessment system for sustainable management by using satellite images (e.g. ALOS, MODIS) to provide more complete (e.g. by including biomass calculation, carbon accounting), more detailed (e.g. through using higher resolution images) and more frequent information (e.g. annual observation).	1. It is confirmed that capacity and capability of BAPLAN and UPT staff are increased significantly to do the monitoring and assessment. 2. It is confirmed that the new methodology of forest resource monitoring and assessment including carbon accounting and biomass calculation is available. 3. Forest resource condition can be monitored and assessed more accurately and frequently. 4. Forest policies for sustainable management are formulated based on accurate forest resource monitoring and assessment system.	Questioners and interview with users, the concerned beneficiaries; review the Project report.	1. There is neither significant change in forest policy nor organizational change in central/ local government.

Outputs 1. Up-graded forest monitoring and assessment system is established in MoF to accommodate the use of other satellite images (e.g. ALOS and MODIS) and capability to calculate biomass and carbon. 2. Human resource capabilities are improved in spatial analysis in the HQs as well as Regional Offices. 3. Sustainable resource management policy is formulated by using extended hardware and software to run the monitoring/assessment system.	1. Forest resource monitoring by using ALOS and MODIS is made. 2. New methodology of forest resource monitoring and assessment including carbon accounting and biomass estimation is made. 3. Integrated GIS and database management will be available. 4. Improved the capability of BAPLAN and UPT staff on forest resource monitoring and assessment by using new technology and methodology. 5. Hardware and software are installed in BAPLAN and UPT to formulate sustainable resource management policy.	1. Report and maps. 2. Official document of MoF, official letter of budget allocation. 3. Technical guidelines. 4. Publication: leaflet, booklet.	1. Related projects would not be drastically changed.
--	--	--	---

Activities	Inputs	Pre-conditions:
1. The Project transfers and introduces technologies of PALSAR/MODIS to Ministry of Forestry in FRM and FRA Systems to upgrade their quality, and prepares for the potential expansion for carbon accounting in the upgraded system. 2. The Project provides professional training for Ministry of Forestry (i.e. Forestry Planning Agency) staff members in capital and regions, in the country as well as in abroad (i.e. in Japan's remote sensing institutions). Different level of trainings will be provided to meet different levels of capabilities and needs. 3. The Project facilitates the process of Ministry of Forestry's sustainable resource management policy formulation. The sustainable resource management policy will be implemented in close cooperation with other initiatives such as FOMAS/FRIS or other network in an integrated way, such as in the following fields: development of GIS, application of FRA, carbon accounting, etc.	Japan: - Experts - Long term experts (2 person) - Chief Advisor (Forest planning) - 3 years - Coordinator (Satellite image analysis) - 3 years - Short term experts (5 persons) - Database management (2 person) - 3 years - Programming (2 person) - 3 years - GIS (1 person) - 3 years - Counterparts training in Japan - Provision of equipment for the Project activities Indonesia: - Experts - Project Director: Director, Forestry Inventory and Mapping - Project Manager: Deputy Director, Remote Sensing - Counterpart personnel for: - Satellite image analysis (2 person) - GIS analysis (1 person) - Programming (1 person) - Administrative personnel for: - Field staffs - Driver - Other necessary support staff - Trainees and student staffs (+/- 100 persons) - Administrative and operational costs - Provision of facilities and equipment for the Project	- Close cooperation between BAPLAN (HQ) and UPTs (Regional Offices) and good coordination and communication. - All parties have high commitment to achieve the Project.

Tabel 14. Project Summary Support On Forest Resource Management Through Leveraging Satellite Image Information

I. BACKGROUND OF THE PROJECT

Out of 190 million ha of Indonesia's land, more than 120 million ha is considered as forestland. To manage the existing forests in a sustainable way, the state and conditions of the forests should be assessed and their changes should be periodically monitored.

Although, the increasing need of forestland for various purposes, illegal logging and trade and other issues often hampered the sustainable forest management. Currently, some forest issues have significantly become global issues (e.g. climate changes).

Remote sensing methods and spatial analysis (e.g. GIS) are proven to be an efficient and effective means to monitor and assess such large forestland area. Forestry in Indonesia has long history on the use of remote sensing images, starting with aerial photographs in 1950's followed by Landsat MSS in 1980 and continuing with Landsat TM and ETM+ in recent years.

National Forest Inventory has started in 1986, aimed at getting information of forest resources through forest resource monitoring (3 yearly repeated observations using Landsat images), forest resource assessment (establishment of Permanent and Temporary Sample Plot and re-measurement of the Permanent Sample Plot), and development of GIS and DIAS (development of hardware, software and brain ware).

Currently, new development and the advancement in spatial analysis have occurred. Better resolution new satellite (optical and radar based) images are available. On the other hand, the need to improve the existing methods is increasing (e.g. increasing the frequency of observation by using alternative images such as lower resolution images).

Many aspects that have not been taken into consideration in the past (i.e. does not include in NFI design) have also emerged, such as analyzing biomass, bio-diversity and carbon accounting. For this reason, a new forest resource monitoring and assessment system that incorporates the new needs should be developed, in line with increasing the capacity (i.e. h/w, s/w) and the human resource capability.

II. TITLE OF THE PROJECT

The title of the project is: Support on Forest Resource management through leveraging Satellite Image Information.

III.OVERALL GOAL

Better monitoring and assessment system on forest resource will support the sustainable forest management. Therefore, the overall goal of the project is: transfer technology of advanced monitoring and assessment system in line with human resource development for sustainable development to improve the quality of spatial data and information.

IV. PROJECT PURPOSES

To enhance the capacity and capability of Ministry of Forestry in implementing forest monitoring and assessment system for sustainable management by using satellite images (e.g. ALOS, MODIS) to provide more complete (e.g. by including biomass calculation, carbon accounting), more detailed (e.g. through using higher resolution images) and more frequent information (e.g. annual observation).

V. OUTPUTS OF THE PROJECT

- a. Up-graded forest monitoring and assessment system is established in MoF to accommodate the use of other satellite images (e.g. ALOS and MODIS) and capability to calculate biomass and carbon.
- b. Human resource capabilities are improved in spatial analysis in the HQs as well as Regional Offices.
- c. Sustainable resource management policy is formulated by using extended hardware and software to run the monitoring/assessment system.

VI. ACTIVITIES OF THE PROJECT

- a. The Project transfers and introduces technologies of PALSAR/MODIS technologies to Ministry of Forestry in FRM and FRA Systems to upgrade their quality, and prepares for the potential expansion for carbon accounting in the upgraded system.
- b. The Project provides professional training for Ministry of Forestry (i.e. Forestry Planning Agency) staff members in capital and regions, in the country as well as in abroad (i.e. in Japan's remote sensing institutions). Different level of trainings will be provided to meet different levels of capabilities and needs.
- c. The Project facilitates the process of Ministry of Forestry's sustainable resource management policy formulation. The sustainable resource management policy will be implemented in close cooperation with other initiatives such as FOMAS/FRIS or other network in an integrated way, such as in the following fields: development of GIS, application of FRA, carbon accounting, etc.

SUPPORTING INFORMATION

a. Justification

1. Basically, there are not many changes between the original proposal and this proposed project. Activities related to management unit (i.e. AAC estimation of concessionaire/HPH) are deleted since it is considered as ambitious and not relevant to the national system.
2. In line with rapid development in remote sensing and GIS technologies, the project puts the priority to enhance the monitoring and assessment system in the MoF (e.g. the use of 'new' higher and lower satellite images such as ALOS and MODIS) and increasing the capability of its staff members through various levels of training.

b. Training needs for MoF

1. Short visit to Japan RS Institutes (20 persons):
 - Senior staff of HQ Forestry Planning Agency : 9 persons
 - Head of Regional Offices : 11 persons
2. Advanced training in Japan Institute of RS (20 persons):
 - Staff members of Forestry Planning Agency : 9 persons
 - Staff members of Regional Offices : 11 persons
3. Basic training in RS (in country) : 3 batches of 20 participants
 - Junior staff of HQ Forestry Planning Agency : 20 persons
 - Junior staff of Regional Offices : 20 persons
 - Junior staff of MoF (other than above) : 20 persons

c. Description:

1. List of current FRA and FRM Information:
 - Land cover maps from medium resolution satellite data: 1997, 2000, 2003, 2006 (3 yearly monitoring)
 - Low spatial information system (MODIS/.spot Vegetation): 2000 to 2005 (in cooperation with SDSU, USA and Wageningen University, the Netherlands)
 - Forestland use map
 - Forest cover maps of selected National parks and Forest Management Units using very high res. satellite images
 - Hotspot monitoring
 - Forestry Thematic Base Maps on 1:250,000
 - Identification of forestland provided for community plantation forests
 - Disaster mitigation map for Java (Land Position Map)
 - Standing stock estimation through:
 - Permanent and Temporary Sample Plots
 - Multistage sampling (Kalimantan 2006, Sumatra/Sulawesi 2007, Papua 2008).
2. Upgrade Opportunities:
 - Improving methodology in FRA and FRM, increasing human resource capability, extended and more sophisticated software, hardware
3. Contribution of the project for such upgrade
 - More detail and frequent information on forest resource can be provided to support sustainable forest management
 - New information to support carbon trade, and consequently supporting sustainable forest management as well.
 - Improve the capability of human resource in Forestry Planning Agency (HQs and Regional offices) as well as in other Institutions within MoF.

B. ADVISORY FOR FACILITATING IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGY ON FORESTRY

Project dengan judul **Advisory for Facilitating Implementation of National Strategy on Forestry** dengan skema LTE yang diusulkan oleh Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. *Project Digest* untuk kegiatan tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Advisory for Facilitating Implementation Of National Strategy on Forestry

Title of the Project		ADVISORY FOR FACILITATING IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGY ON FORESTRY		
Relevant Sector		Forestry		
Name of the Ministry Directorate General		Centre for Forestry Planning and Statistics		
Project Site		Jakarta	Person in Charge	Name : Basuki Karyaatmaja Title : Head of Centre for Forestry Planning and Statistics Phone : 021-5730289 Email : -
Description of Project	Project purposes	a. To enhance National Development Strategy on Forestry of Indonesia b. Improvement of management strategy (planning, implementing, monitoring, evaluating, and policy) and to harmonize of the management among forestry institution (national and sub national level) in order to achieved a good governance practice on forestry development management.		
	Output	a. Spatial data on macro planning b. Frame work on Forest Management Unit		
	Input	From GOI Side		40,000 for 3 years
		Form Japanes		380,000 for 3 years
Additional Explanation		a. Structure of strategy development on forestry management (eg. macro planning based on spatial); b. Structure data and information for the strategy development on forestry; c. Harmonization strategy on forestry planning development among national, provincial, and district; d. Development on institutional frame work for establishing FMU		
BAPPENAS		Date	Ref. No.	Mark
JICA		Date	Ref. No.	Mark

**C. TECHNICAL COOPERATION FORESTRY PROGRAMME
IN SUPPORTING IMPLEMENTATION OF THE MINISTRY OF
FORESTRY'S STRATEGIC PLAN (PROJECT DIGEST)**

Title of The Project : Supporting implementation of Ministry of Forestry's strategic plan

Background :

The programme in cooperation with the Ministry of Forestry is supporting the implementation of the Ministry's Strategic Plan and is meant to focus on measures for reducing greenhouse gas emissions in the forest area. Based on the KfW/GTZ fact-finding mission and with a view to the future orientation towards programme formation, the Indonesian Government is to be given support for implementing avoided deforestation *and forest existence improvement* .

Objective :

To implement of strategic plan which is integrated and synergized with other sector planning, in particular provincial and districts programme.

Output :

1. Management Strategy Improved (Planning, implementing, monitoring-evaluation and policy)
2. Mechanism for harmonizing National Forestry Planning with both provincial and district level established
3. Strategy development on Forest Management Unit established
4. Macro planning based on spatial development established
5. Institutional capacity (capacity building) on forestry planning improved

Input :

1. Data and information
2. Experts national/ international
3. Funding
4. Equipments

Executing Agency :

The Ministry of Forestry

Implementing Agencies:

Forestry Planning Agency, and his partner at local government in provincial and district level.

Type of cooperation scheme :

Grant

Project site :

Jakarta and 4 representative provinces in regional Sumatra, Kalimantan, Celebes, Bali and NUSA TENGGARA.

Duration :

3 (three) years

Financing :

Bi-lateral cooperation The Government of The Federal Republic of Germany provide Euro 3.5 Million

VI. WEBSITE-WEBSITE YANG TERKAIT DENGAN KERJASAMA BANTUAN LUAR NEGERI

Berikut ini kami tampilkan alamat-alamat negara dan lembaga donor yang relevan dengan sektor kehutanan. Lebih jelasnya bisa diakses di website yang bersangkutan seperti berikut ini :

1. Center for International Forestry Research (CIFOR), www.cifor.cgiar.org
2. Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora, www.cites.org
3. Forestry Department of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), www.fao.org
4. Global Forest Watch, www.globalforestwatch.org
5. International Society for Mangrove Ecosystem (ISME), www.mangrove.or.jp
6. International Union for Forestry Research Organizations (IUFRO), www.iufro.org
7. Tropical Forest Trust, www.tropicalforesttrust.com
8. United Nations Forum on Forests (UNFF), www.un.org
9. Worl Bank, www.worldbank.org
10. Conservation International, www.conservation.org
11. Forest Protection Portal, www.forests.org
12. United Nations Convention to Combat Desertification, www.unccd.int
13. USDA Forest Service International Programs, www.fs.fed.us/global
14. Global Environment Facility (GEF), www.gef-indonesia.org, GEF Secreatariat Indonesia Biro Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementrian Lingkungan hidup Jalan DI Panjaitan Kavling 24, Jakarta Timur Telp: 021-8580110
15. The Asia-Pacific Forum for Environment and Development (APFED), www.apfed.net
16. Ford Foundation (FF), www.fordfound.org, P.O. Box 2030 Jakarta 10020, Indonesia Telp. 62-21-252-4073 Fax. 62-21-252-4078
17. Australian Center for International Agriculture Research (ACIAR), www.aciar.gov.au

18. Global Environment Facility (GEF), GEF Secretariat Indonesia, Biro Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup Jalan DI Panjaitan Kavling 24, Jakarta Timur Telp: 021-8580110, www.gef-indonesia.org
19. The GEF Small Grants Programme – Indonesia, www.sgp-indonesia.org
20. Centre Training and Award Program International Development Research Center (IDRC) 250 Albert Street Ottawa, Ontario K1P 6M1 Canada, Telp: (1 613) 236-6163, ext.: 2098, Fax: (1 613) 563-0815, e-mai: cta@idrc.ca situs <http://www.idrc.ca/>
21. WWF Indonesia, Kantor Taman A9, Unit A-1, Jl. Mega Kuningan Lot 8-9/A9 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 phone. +62 21 5761070, fax. +62 21 5761080, P.O Box 5020 JKTM 12700, email: WWF-Indonesia@wwf.or.id
22. WWF Indonesia – Pekanbaru, Perkantoran Grand Sudirman, Blok B1 Jl. Datuk Setia Maharaja, Pekanbaru-Riau 28282, Phone: (0761) 855006 Fax (0761) 35323

DAFTAR PUSTAKA

1., 2007 Profil SMCP (First edition)
2., 2007 Profil MFP (Revised edition)
3. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. 2006. Presentasi Perkembangan MFP-Dephut – DFID, Kerjasama Bilateral RI-UK. Badan Planologi Kehutanan, Jakarta.
4., 2007 Japan International Cooperation Agency (JICA) di Indonesia. Laporan kegiatan JICA. JICA, Jakarta.
5., 2007 Tanda Persahabatan Indonesia dan Jepang Kerjasama Ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Japan Official Development Assistance. Jakarta.
6., 2005. Profil Organisasi Internasional Bidang Kehutanan. Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan. Jakarta
7., 2006. Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
8., 2006. Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005 – 2009 (Penyempurnaan). Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.

EDISI REVISI
Desember 2007